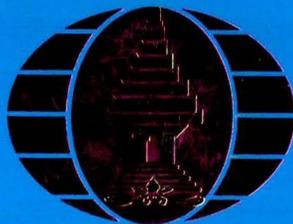


**KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
NOMOR : KEP-04-A/MKP/VI/2001**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
TAHUN 2000 - 2004**



**Rektorat  
Layanan**

**DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
TAHUN 2001**

**KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

**NOMOR : KEP-04-A/MKP/VI/2001**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
TAHUN 2000 - 2004**

**DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
TAHUN 2001**





## **KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Nomor : KEP-04-A/MKP/VI/2001

### **T E N T A N G**

#### **PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2000-2004**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran kebudayaan dan pariwisata dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan, diperlukan komitmen yang bersifat strategis dari seluruh pelaku di bidang kebudayaan dan pariwisata;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan berpedoman pada naskah program Pembangunan Nasional (Propenas), perlu ditetapkan Rencana Strategis Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2000-2004 dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas)

Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Susunan Kabinet Republik Indonesia Periode Tahun 1999 – 2004;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2000;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen.

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TAHUN 2000 – 2004.**

**PERTAMA** : Menetapkan Rencana Strategis Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2000 – 2004, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Rencana Strategis Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud diktum Pertama merupakan pedoman dalam penyelenggaraan dan pembangunan kebudayaan dan pariwisata.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 1 Juni 2001

---

**MENTERI KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA**



*[Handwritten Signature]*  
**IGEDE ARDIKA**



## DAFTAR ISI

---

	Hal
<b>BAB 1</b> : Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Peran Strategis Kebudayaan Dan Pariwisata.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Landasan .....	9
1.5. Permasalahan .....	14
1.6. Kerangka Pikir .....	17
1.7. Ruang Lingkup .....	17
<b>BAB 2</b> : Perkembangan Kebudayaan dan Pariwisata saat ini.....	19
2.1. Umum.....	19
2.2. Perkembangan Kebudayaan ..	21
2.3. Perkembangan Pariwisata .....	26
<b>BAB 3</b> : Visi dan Misi .....	31
3.1. Visi .....	31
3.2. Misi.....	34
<b>BAB 4</b> : Analisis Lingkungan Strategis .....	37
4.1. Situasi Nasional .....	37
4.2. Situasi Internasional .....	41

<b>BAB 5</b>	: Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata .....	51
	5.1. Tujuan jangka Panjang .....	51
	5.2. Tujuan jangka Pendek .....	53
	5.3. Susunan Pembangunan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata ..	54
	5.4. Tahapan Pencapaian Sasaran Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata .....	57
<b>BAB 6</b>	: Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata .....	63
	6.1. Kebijakan .....	63
	6.2. Strategi .....	65
<b>BAB 7</b>	: Program Kebudayaan dan Pariwisata serta Program Pendukung Lintas Sektor .....	69
	A. Program Umum Bidang Kebudayaan dan Pariwisata .....	71
	B. Program Pemajuan Kebudayaan....	74
	C. Program Pengembangan Kepariwisata .....	75
	D. Program Pendukung Lintas Sektor .....	76
<b>BAB 8</b>	: Penutup .....	79
<b>Lampiran</b>	: <i>Daftar Nama Pejabat dilingkung- an Departemen Kebudayaan dan Pariwisata .....</i>	81

# BAB 1

## PENDAHULUAN

---

### 1.1. Latar Belakang

Memasuki era baru pasca reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia masih dihadapkan kepada permasalahan yang sangat rumit meliputi semua aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, keamanan dan keutuhan nasional. Persoalan ini merupakan akumulasi dari berbagai persoalan bangsa akibat krisis ekonomi sejak tahun 1997 yang sampai saat ini masih belum mampu diselesaikan secara tuntas.

Dalam kaitan ini, terdapat lima permasalahan pokok yang dihadapi bangsa, yakni : (1) munculnya gejala disintegrasi bangsa dan merebaknya konflik sosial; (2) lemahnya penegakan hukum dan hak asasi manusia; (3) lambatnya pemulihan ekonomi; (4) rendahnya kesejahteraan rakyat, meningkatnya penyakit sosial dan lemahnya ketahanan budaya nasional; dan (5) kurang berkembangnya potensi pembangunan daerah dan masyarakat.

Bertitik tolak dari permasalahan pokok tersebut, berdasarkan Undang Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000 – 2004, Pemerintah telah menetapkan **lima agenda prioritas pembangunan nasional** yang

akan dijadikan dasar dan acuan program pembangunan oleh berbagai bidang atau departemen – departemen yang ada. Kelima agenda prioritas pembangunan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan.
2. Mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik.
3. Mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang bersumber pada sistem ekonomi kerakyatan.
4. Membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan ketahanan budaya.
5. Meningkatkan pembangunan daerah.

Kelima agenda prioritas pembangunan nasional tersebut harus ditangani secara menyeluruh agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai. Oleh karena itu, melalui PROPENAS, pemerintah bersama dengan masyarakat, usaha swasta, BUMN, perguruan tinggi dan lembaga kepakaran, LSM diharapkan dapat mengembangkan program – program pembangunan yang saling bersinergi dalam menjawab permasalahan pokok yang dihadapi bangsa.

Dalam hubungan ini, tugas utama pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata adalah mampu menjawab agenda prioritas ketiga, yakni mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan yang bersumber kepada sistem ekonomi kerakyatan; serta agenda prioritas keempat, membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan ketahanan budaya. Sementara itu, melalui program lintas bidang, semua agenda prioritas pembangunan lainnya secara otomatis akan terkait pula dengan pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata terutama sektor penunjang utama pariwisata antara lain perhubungan, keamanan, keselamatan, imigrasi, bea cukai dan karantina serta unsur-unsur lain yang ada di masyarakat sebagaimana digambarkan pada halaman 4-A.

Disamping itu, saat ini kita sedang dihadapkan pada kondisi masyarakat dunia dan masyarakat Indonesia yang sedang mengalami perubahan menghadapi tata hubungan antarbangsa yang makin terbuka dan bebas. Hal ini mendorong perlunya perubahan tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Arus informasi budaya yang datang dari luar makin meningkat dan tidak dapat dicegah sehingga apabila tidak waspada, dikhawatirkan akan dapat mengancam ketahanan budaya bangsa. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat ketahanan budaya menjadi salah satu tugas yang penting dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata.

Selain itu, dalam upaya pemulihan kondisi ekonomi nasional, krisis yang menerpa Indonesia pada tahun 1997 masih menyisakan dampak negatif hingga sekarang ini. Sektor industri dan jasa masih mengalami penderitaan yang sangat berat. Namun demikian, Pemerintah sangat menaruh harapan kepada sektor pariwisata yang diharapkan akan mampu membantu pemulihan ekonomi Indonesia dari krisis yang berkepanjangan ini.

Hal ini didasarkan adanya kenyataan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang paling siap dari segi fasilitas, sarana, prasarana dan infrastrukturnya dibandingkan sektor – sektor lainnya. Sektor pariwisata juga dianggap sebagai sektor yang mampu menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang ada di masyarakat, sehingga pengembangan pariwisata yang berbasis kerakyatan (*community-based tourism development*) harus menjadi landasan dan acuan yang penting dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata nasional. Dengan kata lain, pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang berbasis kerakyatan harus menjadi wahana agar manfaat berupa peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat segera diwujudkan dan dirasakan langsung oleh rakyat.

Ditingkat regional dan global, pembangunan pariwisata dihadapkan pula kepada tantangan yang sangat berat, terutama bila dikaitkan dengan kompetisi yang makin tajam. Era kesejagatan (globalisasi), telah membawa pula konsekuensi dan



# Wisatawan

- Bandara
- Energi



**WISMAN**

**Custom  
Imigration  
Quarantine**

TERMINAL

## Transportasi

Industri Transportasi



## Transfer

- Jalan
- Rel

- Hasil Pertanian
- Hasil Peternakan
- Hasil Perikanan
- Jasa Industri
- Industri Pendukung



**Hotel**



**Restoran**

- Hasil Pertanian
- Hasil Peternakan
- Hasil Perikanan



**Hiburan**



**Souvenir**



**MICE**



**Objek Wisata**

- Usaha Inti Rakyat
- Industri Pendukung

# OBJEK & DAYA TARIK WISATA

# Sisparnas



perubahan-perubahan penting terhadap perkembangan industri pariwisata nasional, terutama pemanfaatan kemajuan teknologi dan perubahan-perubahan pola tingkah laku (*behavioural-pattern*) wisatawan internasional. Persaingan antar tujuan wisata ditingkat regional dan internasional menjadi tantangan tersendiri seiring dengan harapan para pakar dunia yang memperkirakan pariwisata akan menjadi industri terbesar abad ke-21 ini.

## **1.2. Peran Strategis Kebudayaan dan Pariwisata**

Berdasarkan uraian diatas, tampaknya pembangunan kebudayaan dan pariwisata akan dihadapkan kepada keadaan yang makin menantang sekaligus membawa peluang untuk dapat kita sikapi secara konsepsional.

Pembangunan kebudayaan akan memiliki peran yang penting dalam memperkokoh ketahanan budaya dan keutuhan (*integrity*) nasional dari ancaman konflik horizontal dan vertikal yang dapat mengarah kepada disintegrasi bangsa. Oleh karena itu pembangunan kebudayaan mempunyai andil yang besar dalam membangun watak dan bangsa yang berbudaya (*nations and character building*) menuju perwujudan masyarakat madani (*modern civilized and society*).

Sedangkan pembangunan pariwisata akan mempunyai arti penting dalam membantu mengentaskan bangsa Indonesia dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan memulihkan kehidupan

sediakala. Namun demikian, pembangunan pariwisata tidak dapat dilepaskan dari ketahanan budaya dan integritas nasional karena pembangunan pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan bangsa. Disamping itu pembangunan kebudayaan pun tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pariwisata, karena bersama pariwisata, prestasi dibidang kebudayaan akan dapat lebih menciptakan nilai tambah baik bagi bangsa maupun negara serta peradapan dunia. Hubungan keduanya ibarat dua sisi dari satu keping mata uang.

Makin disadari pula bahwa pengembangan dan pengelolaan sektor kebudayaan dan pariwisata tidak mungkin dapat berdiri sendiri, karena baik secara langsung maupun tidak langsung akan tetap dipengaruhi oleh berbagai lingkup strategis ; antara lain tiga faktor :

**Pertama**, arus **globalisasi**, yang terjadi secara mondial dan bersifat multidimensi akan membawa dampak perubahan terhadap kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Melalui globalisasi pula dirasakan kemajuan teknologi, komunikasi dan transportasi yang terasa sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia termasuk dibidang bisnis dan ekonomi. Akibat kemajuan teknologi pula gerakan yang semula hanya dilakukan oleh para mahasiswa di Indonesia memalui proses komunikasi, melalui media cetak dan elektronik. telah mampu menyentuh nurani rakyat sehingga melahirkan gerakan reformasi yang telah mempersatukan rakyat dengan mahasiswa (untuk

melakukan perubahan-perubahan demi kemajuan bangsa).

**Kedua, reformasi** yang timbul akibat ditekannya berbagai aspek kehidupan oleh pemerintahan yang bersifat otoriter sehingga aspirasi rakyat tidak dapat tersalurkan secara utuh dan normal. Diawali oleh gerakan mahasiswa yang mampu menyentuh nurani rakyat maka terbentuklah kekuatan rakyat yang berhasil menumbangkan pemerintahan otoriter dan membawa rakyat Indonesia ke gerbang kehidupan demokrasi. Akibat kehidupan yang demokratis ini telah pula mengubah peran pemerintah yang selama 32 tahun selalu berada di barisan terdepan dalam pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata nasional berubah menjadi hanya sebagai **fasilitator** dengan pemeran utama pembangunan berada di pundah dunia usaha swasta. Perubahan sikap (*attitude*) ini akan sangat berpengaruh terhadap program-program yang akan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) ini, dimana pemerintah lebih berperan untuk menciptakan iklim usaha yang baik sehingga kehidupan pariwisata Indonesia dapat tumbuh berkembang secara lebih efisien dan efektif.

Faktor **ketiga** adalah adanya perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi ke sistem **desentralisasi**. Hal itu terjadi dengan ditetapkannya UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang mengatur tatanan pemerintah yang bersifat otonomi dengan meletakkan otonomi

daerah tidak pada Propinsi, melainkan pada Kabupaten dan Kotamadya. Selanjutnya, sebagai konsekwensi dari tatanan otonomi daerah ini, maka perimbangan kewenangan antara pusat dan daerah harus pula ditetapkan.

Perubahan pemerintah menjadi sistem desentralisasi berpengaruh pula pada kebijaksanaan dan strategi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, yang dengan sendirinya harus dijalankan sejalan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan tersebut. Namun perubahan sistem pemerintah dimaksud, tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan yang terjadi akibat globalisasi. Hal ini juga tidak dapat dipisahkan dengan situasi dalam negara kita, khususnya yang berkaitan dengan tingkat stabilitas pada keamanan dalam negeri. Hal ini sangat terasa pada kedatangan arus wisatawan mancanegara yang mengunjungi keberbagai daerah wisata didalam wilayah Nusantara.

Kenyataan ini, merupakan hal yang harus diperhatikan, sebagai pemahaman latar belakang situasi yang kita hadapi. Dan hal ini tentunya berpengaruh di dalam melaksanakan Renstra dan Program Tahunan pembangunan kebudayaan dan pariwisata nasional.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kebudayaan dan Pariwisata 2000- 2004 adalah untuk menguraikan ketentuan-

ketentuan tersebut dalam Undang Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), kedalam visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan strategi, program dan pokok – pokok kegiatan. Sehingga dapat dijadikan acuan oleh masyarakat pariwisata Indonesia baik yang bergerak di pemerintahan maupun di sektor swasta, pers, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan unsur insan pariwisata lainnya.

#### **1.4. Landasan**

Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata 2000 – 2004 disusun berdasarkan landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, landasan operasional GBHN 1999, serta Undang Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000 – 2004, Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Kepres 65 – 66; Kepres 165/2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen

Sebagaimana dimaklumi bahwa pembangunan nasional adalah rangkaian upaya dan kegiatan yang berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas berbagai, meliputi aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Selain itu penyelenggaraan negara dilaksanakan pula melalui pembangunan nasional yang mencakup segala aspek kehidupan bangsa, oleh penyelenggara negara, bersama – sama seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, GBHN 1999 telah pula memberikan gambaran tentang kondisi umum kehidupan bernegara saat ini, serta visi, misi dan arah kebijakan pembangunan sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan untuk lima tahun kedepan.

Kondisi umum, visi, misi serta arah kebijakan yang diuraikan dalam GBHN, serta arah kebijakan dan program pembangunan sektoral selanjutnya dituangkan dalam PROPENAS yang merupakan landasan pokok dalam penyusunan RENSTRA (Rencana Strategis) Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Nasional tahun 2000 – 2004.

Ketetapan MPR-RI Nomor IV/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara 1999, telah

menggariskan pula penyusunan program pembangunan bidang kebudayaan dan pariwisata sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan membina kebudayaan nasional Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional yang mengandung nilai – nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mendukung terpeliharanya kerukunan hidup bermasyarakat dan membangun peradaban bangsa.
2. Merumuskan nilai – nilai kebudayaan Indonesia, sehingga mampu memberikan rujukan sistem nilai terhadap totalitas kehidupan ekonomi, politik, hukum dan kegiatan kebudayaan dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional dan peningkatan kualitas berbudaya masyarakat.
3. Mengembangkan sikap kritis terhadap nilai – nilai budaya dalam memilah – milah nilai budaya yang kondusif dan serasi untuk menghadapi tantangan pembangunan bangsa di masa depan.
4. Mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian untuk mencapai sasaran sebagai pemberi inspirasi kepekaan rasa terhadap totalitas kehidupan dengan mengacu kepada etika, moral estetika dan agama, serta memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta dan royalti bagi pelaku seni dan budaya.

5. Mengembangkan dunia perfilman Indonesia secara sehat sebagai media masa kreatif yang memuat keberagaman jenis kesenian untuk meningkatkan moralitas agama serta kecerdasan bangsa, pembentukan opini publik yang positif dan peningkatan nilai tambah secara ekonomi.
6. Melestarikan apresiasi nilai kesenian dan kebudayaan tradisional serta menggalakan dan memberdayakan sentra – sentra kesenian untuk merangsang berkembangnya kesenian nasional yang lebih kreatif dan inovatif, sehingga menumbuhkan rasa kebanggaan nasional.
7. Menjadikan kesenian dan kebudayaan tradisional Indonesia sebagai wahana bagi pengembangan pariwisata nasional dan mempromosikannya keluar negeri secara konsisten sehingga dapat menjadi wahana persahabatan antarbangsa.
8. Mengembangkan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu bersifat interdisipliner dan partisipatoris dengan menggunakan kriteria ekonomis, teknis, ergonomis, sosial, budaya, hemat energi, melestarikan alam, dan tidak merusak lingkungan.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), khususnya Bab VIII tentang Pembangunan Sosial dan Budaya ditetapkan bahwa

pembangunan kebudayaan dan pariwisata dilaksanakan melalui Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan dan Program Pengembangan Pariwisata.

Tujuan program pelestarian dan pengembangan kebudayaan adalah untuk menanamkan nilai – nilai budaya bangsa dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada warisan budaya bangsa, keragaman budaya dan tradisi, meningkatkan kualitas berbudaya masyarakat, menumbuhkan sikap kritis terhadap nilai – nilai budaya dan memperkuat ketahanan budaya.

Sedangkan tujuan program pengembangan Pariwisata adalah mengembangkan dan memperluas diversifikasi produk dan kualitas pariwisata nasional yang berbasis kepada pemberdayaan masyarakat, kesenian dan kebudayaan serta sumber daya (pesona) alam lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian seni dan budaya tradisional serta kelestarian lingkungan hidup setempat; dan mengembangkan dan memperluas pasar pariwisata terutama pasar luar negeri.

Selanjutnya, Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Bab XII tentang Pembinaan dan Pengawasan, pasal 112, ayat satu menyebutkan bahwa dalam rangka pembinaan, Pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah, dalam arti memberdayakan daerah otonom melalui pemberian

pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.

Disamping itu berdasarkan Kepres RI Nomor 165 Tahun 2000 telah ditetapkan tugas Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) yakni menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah dibidang kebudayaan dan pariwisata.

Fungsi Depbudpar adalah melaksanakan fungsi: (a) pelancaran pelaksanaan dibidang kebudayaan dan pariwisata; (b) pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Departemen; (c) pelaksanaan penelitian dan pengembangan terapan, pendidikan dan pelatihan tertentu dalam rangka mendukung kebijakan dibidang kebudayaan dan pariwisata; dan (d) pelaksanaan pengawasan fungsional.

### **1.5. Permasalahan**

Dengan mengacu kepada berbagai aspek yang melatar belakangi penyusunan Renstra seperti yang digambarkan di atas, maka permasalahan yang diuraikan di sini tentu yang berkaitan dengan subtansi tugas departemen ini, dengan tetap memperhatikan tuntutan situasional yang sedang dihadapi, yakni konsolidasi intern Depbudpar. Untuk tahun mendatang Depbudpar secara bertahap akan menempatkan diri sebagai fasilitator di sektor kebudayaan dan pariwisata nasional yang tugas utamanya adalah mendorong masyarakat untuk

mengembangkan kegiatan di sektor kebudayaan dan pariwisata untuk sebesar-besar manfaat bagi seluruh masyarakat bangsa, negara dan peradaban dunia. Ini berarti untuk mengawali langkahnya harus menjawab dengan memberdayakan diri secara lebih terbuka, lebih demokratis dengan menciptakan birokrasi yang transparan, memiliki akuntabilitas dan bersikap *enterpreuner*. Sejalan dengan itu Depbudpar mengajak pula berbagai kekuatan masyarakat yang berkarya dan mempunyai minat di sektor kebudayaan dan pariwisata untuk bersama sama membangun ketahanan kebudayaan nasional dan mendukung ekonomi yang berkerakyatan melalui program kebudayaan dan pariwisata. Langkah ini merupakan usaha pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan strategi ajakan dan merupakan upaya Depbudpar untuk membuka semangat baru pemerintahan guna meningkatkan kemampuan profesional para pelaku yang berkarya dan berminat di kedua bidang yang memang memiliki substansi untuk saling menopang.

Strategi ini juga dimaksudkan untuk membangun berbagai usaha nyata di dalam menghadapi berbagai pendapat yang berkembang di masyarakat yang sedang berkecamuk saat ini, yang berkaitan dengan posisi kebudayaan dan pariwisata dalam tatanan kehidupan bangsa. Sesungguhnya budaya dan pariwisata memiliki posisi strategis untuk melakukan pendekatan baru, sebagai alternatif menghadapi dan menyelesaikan perbedaan pandangan melalui pendekatan sejarah purbakala dan

nilai budaya dan pendekatan ekonomi. Pendekatan sejarah purbakala dan nilai budaya amat strategis untuk menjadi perekat bangsa yang sedang mengarah ke-keretakan. Sedangkan pendekatan ekonomi berkaitan dengan tugas Depbudpar untuk dapat menjadikan kepariwisataan kita sebagai salah satu pilar utama yang mampu memberikan sumbangan berarti, bagi penanggulangan krisis ekonomi saat ini dan pertumbuhan di masa mendatang.

Pemberdayaan publik dan bangunan birokrasi-demokratis ini nantinya akan menjadi penopang bagi usaha Depbudpar untuk penyelesaian krisis nilai, kebudayaan dan sekaligus membantu upaya pemerintah di bidang ekonomi.

Pemberdayaan publik dan bangunan birokrasi-demokratis ini, melalui strategi ajakan akan meningkatkan ketahanan budaya dan membangun kesejahteraan rakyat yang merupakan salah satu wujud dari usaha mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pemberdayaan publik dengan cara menempatkan pemerintah sebagai fasilitator, dalam arti bekerjanya birokrasi-demokrasi, juga tidak dapat dipisahkan dari usaha yang lebih luas yaitu usaha membangun sistem ekonomi kerakyatan, yang membuka peluang bagi semua lapisan masyarakat mendapatkan hak untuk memajukan kemampuan, mendapatkan kesempatan yang sama, memperoleh perlindungan dalam rangka peningkatan taraf hidup dan keikutsertaan secara aktif dalam pelbagai kegiatan ekonomi.

## **1.6. Kerangka Pikir**

Bertolak dari latar belakang dan permasalahan yang diuraikan di atas, maka kerangka pikir yang digunakan disini didasari oleh perangkat formal kehidupan bernegara yang kita miliki, yaitu UUD 1945, GBHN, Propenas, Renstra dan Properta dengan tujuan terciptanya ketahanan budaya dan ekonomi kerakyatan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

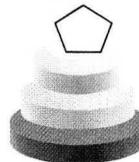
## **1.7. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari Renstra ini, dilihat dari kerangka waktu yang tersedia adalah empat tahun, dari 2000 s.d 2004. Sedangkan dilihat dari segi substansi, Renstra ini menjangkau substansi tugas fungsi Depbudpar yaitu pengembangan sektor kebudayaan dan pariwisata nasional. Ruang lingkup temporal dan substansial itu tentu tidak dapat mengabaikan kendala dan hambatan yang dapat muncul setiap saat baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Walaupun demikian, ruang lingkup ini diharapkan akan dapat mendorong jajaran Depbudpar untuk mampu melihat secara cermat tantangan sekaligus peluang yang terbuka di hadapan kita. Artinya, pimpinan dan jajaran birokrasi-administratif harus mampu meningkatkan kemampuan konseptual dan ketrampilan, maupun untuk menggunakan peluang yang ada guna mewujudkan visi-misi dan mengerjakan program yang dirumuskan di dalam Renstra ini.

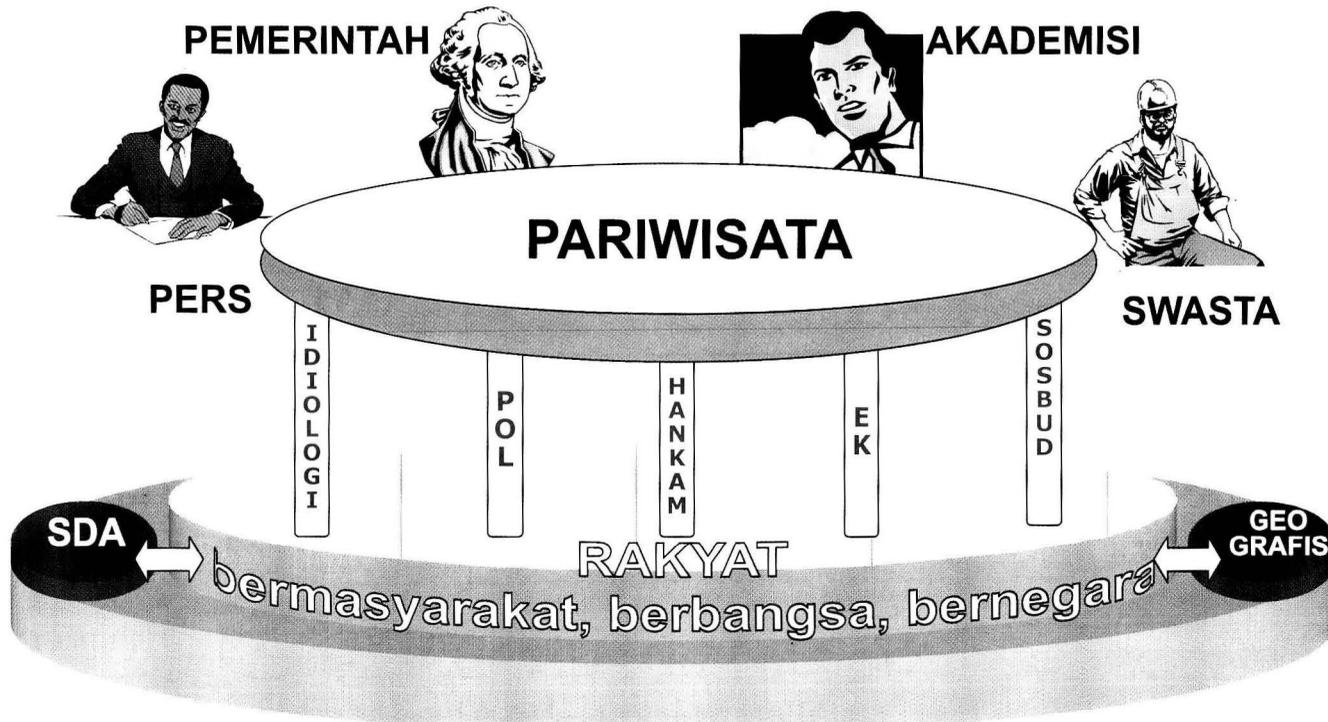
Program dalam Renstra ini merupakan Program substantif yang terstruktur, disusun menurut tingkat kepentingan dan keluasan permasalahan. Struktur program akan menjadi acuan bagi penyusunan kegiatan tahunan agar tercapai sinergi dan kesinambungan dalam mencapai berbagai sasaran yang dicanangkan.

# SISTEM KEPARIWISATAAN NASIONAL



NILAI AGAMA  
PANCASILA  
UUD '45  
GBHN  
UU No. 9 Th. '90

*Idiil  
Konstitusional  
Operasional*





# BAB 2

## PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SAAT INI

---

### 2.1. Umum

Terjadinya krisis ekonomi di kawasan Asean terutama di Indonesia sejak tahun 1997 telah membawa dampak yang besar bagi stabilitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Krisis ekonomi yang tidak segera terselesaikan, dengan cepat telah memicu munculnya krisis baru di bidang politik yang menuntut adanya reformasi total dalam berbagai tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun tuntutan reformasi total yang belum terformat dan terkendali secara baik ini tanpa disadari telah menimbulkan berbagai gejolak di berbagai daerah yang terkait erat dengan aspek keamanan dan ketertiban.

Bangsa Indonesia yang sebelumnya dikenal karena memiliki budaya tinggi, luhur, ramah, santun, beradab, bertoleransi tinggi antar sesama, secara tidak sengaja dan tidak disadari berubah menjadi bangsa yang mudah tersinggung, emosional, egois dan seakan - akan telah kehilangan jati diri sebagai bangsa yang besar. Pembatasan tumbuhnya aspirasi rakyat sebagai akibat sistem kekuasaan yang represif

selama tiga dasa warsa mendadak terbuka lebar tanpa disertai suatu konsepsi matang bersamaan dengan terbukanya era reformasi mengakibatkan pemahaman jati diri bangsa menjadi sangat sempit.

Sesungguhnya akar jati diri bangsa dari sisi budaya dalam arti luas, akan mampu mempersatukan bangsa untuk bersama membangun bangsa yang telah menjadi sangat rapuh. Kebhinekaan budaya bangsa yang seharusnya menjadi faktor keunggulan dan diharapkan mampu melakukan sinergi dan bersatu membangun masyarakat adil dan makmur ternyata belum dapat menjadi akar pembangunan yang sesungguhnya.

Jiwa dan semangat bhinneka tunggal ika yang sebenarnya telah menjadi komitmen nasional menjadi alat utama dalam membangun bangsa, ternyata baru mampu menjadi sebuah wacana. Apabila ditelusuri lebih mendalam ternyata kegagalan pembangunan selama ini lebih disebabkan kurangnya kepedulian kita terhadap potensi kebhinekaan bangsa yang kita miliki. Hal ini terjadi pula dibidang pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan Indonesia.

Walaupun berbagai kebijakan telah ditempuh untuk memulihkan citra, namun hasilnya belum seperti yang diharapkan. Kegagalan tersebut antara lain disebabkan masih lemahnya fungsi dan peranan "*public relation*" kita pada semua lini, dan juga karena kondisi dalam negeri yang memang kurang kondusif.

Penggabungan penanganan kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata dalam satu

institusi yakni Depbudpar sejak akhir tahun 2000 tentu diharapkan akan membawa perubahan mendasar dalam berbagai kebijakan pembangunan kedua bidang tersebut. Kebijakan dan ukuran keberhasilan atau kinerja pembangunan pariwisata yang selama ini sangat erat dan kental dengan aspek ekonomi yang belum mampu membawa pada tingkat keseimbangan kesejahteraan masyarakat, tentu secara bertahap akan bergeser dengan lebih didasari pada aspek kebhinekaan budaya masyarakat yang menjadi payung dalam pembangunan kepariwisataan Indonesia.

## **2.2. Perkembangan Kebudayaan**

Adanya suatu kenyataan yang selama ini kurang memperoleh kepedulian, adalah bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau besar kecil yang dihuni oleh lebih dari 200 juta jiwa, dan terdiri dari berbagai suku bangsa. Tidak kurang dari 500 kelompok etnis dengan keaneka ragaman agama, adat dan budaya ada di Indonesia. Merupakan sebuah kenyataan sejarah bahwa semangat dan jiwa Bhineka Tunggal Ika yang menjadi semboyan kita, telah mampu memotivasi persatuan dan kesatuan di tengah pluralitas etnis, agama dan budaya dalam merebut kemerdekaan. Kekuatan bangsa Indonesia di masa lalu, baik dilihat dari aspek historis maupun sosiologis terletak pada pluralitas yang disatukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul di dalam negeri pada masa itu.

Namun dalam perjalanan untuk mengisi kemerdekaan, pembangunan sumber daya manusia Indonesia terutama aspek budaya kurang mendapat perhatian yang memadai. Pembangunan lebih dititik beratkan pada aspek ekonomi dan politik, sehingga dalam implementasinya pembangunan telah kehilangan nilai kemanusiaannya. Karena rencana pembangunan itu sendiri kurang aspiratif maka pada akhirnya hanya membawa kebahagiaan sekelompok kecil masyarakat dan membawa kesusahan bagi kelompok masyarakat lain yang jumlahnya justru lebih besar. Gesekan antar suku, agama, dan antar nilai mulai muncul karena hal-hal kecil, dan hal ini berkembang dan muncul bersamaan dengan datangnya era reformasi.

Potensi adat dan budaya dari setiap suku bangsa yang semula mampu menjadi perekat persatuan, menjadi makin memudar dengan sistem standarisasi atau keseragaman yang diterapkan selama ini. Kreativitas tersumbat. Penghargaan terhadap nilai budaya berkurang. Peranan dan keberadaan lembaga adat baru terlihat apabila ada upacara atau acara tertentu saja. Pertumbuhan dan perkembangan sanggar seni budaya pun berjalan sangat lamban. Minat dan apresiasi masyarakat kepada karya budaya masih belum memadai.

Hal ini tampak dari pertumbuhan dan perkembangan kunjungan masyarakat ke museum seni, budaya dan sejarah yang masih rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia. Apresiasi masyarakat terhadap nilai sastra belum

menggembirakan. Hal ini akibat dari proses pengungkungan budaya masyarakat dalam arti luas untuk waktu yang cukup lama.

Terlebih lagi jika dikaitkan dengan kemampuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Berbagai kebijakan pemerintah beberapa tahun terakhir ini ke arah ini belum berjalan mulus. Kepemilikan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) di bidang seni di Indonesia masih sangat sedikit. Pertumbuhan dan perkembangan “industri seni” masih banyak mengalami hambatan.

Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi yang terjadi di dalam dasa warsa terakhir ini telah memacu terjadinya pertemuan antarbudaya melalui media televisi, internet, majalah, dan media lain. Arus informasi dan visualisasi budaya asing melalui media elektronik tidak sepenuhnya dapat disaring dan akan berpengaruh dalam proses pematangan dan pendewasaan anak-anak Indonesia.

Posisi geografis Indonesia yang terletak di persimpangan benua dan samudra, serta posisi kultural Indonesia yang terletak di pertengahan antara budaya barat dan budaya timur, memosisikan Indonesia sebagai “jembatan budaya” antara kebudayaan barat dengan kebudayaan timur. Namun demikian, tampaknya masih ada ketidak seimbangan dalam proses adaptasi, karena internasionalisasi budaya terjadi satu arah saja. Masyarakat Indonesia lebih mudah menangkap dan meniru dari pada mempengaruhi budaya lain.

Pertemuan nilai budaya atau kontak budaya (*cultural contact*) dapat menghasilkan dua kemungkinan yang terjadi; yaitu pertemuan dengan tanpa menghasilkan nilai baru yang berarti (*assimilation*) serta pertemuan dengan menghasilkan nilai baru yang bermakna (*acculturalization*).

Agar dapat mengambil manfaat dalam proses pertemuan budaya, maka setiap bangsa harus senantiasa berusaha untuk meningkatkan ketahanan budaya masyarakat. Dengan ketahanan budaya yang memadai, maka suatu bangsa akan mempunyai kemampuan untuk memilah dan memilih nilai budaya baru yang ditawarkan dalam pertemuan antar budaya.

Dalam era globalisasi saat ini kebudayaan Indonesia bertemu dengan kebudayaan lainnya di dunia, baik dengan bangsa yang berperadaban tinggi maupun dengan bangsa yang berperadaban rendah. Oleh karena itu bangsa Indonesia dituntut untuk lebih meningkatkan ketahanan budaya yang telah dimilikinya. Tanpa adanya usaha peningkatan ketahanan budaya yang memadai, bangsa Indonesia tidak akan mampu bertahan dalam pencatutan global.

Pertemuan antara kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan lainnya secara evolusi akan menghasilkan struktur dan sistem masyarakat yang baru; yang sering disebut dengan Masyarakat Indonesia Baru. Adapun Masyarakat Indonesia Baru yang didambakan ialah suatu masyarakat yang berperilaku sosial secara berbudaya, mempunyai daya tangguh kultural yang

memadai, mempunyai toleransi kultural antar bangsa, berketahanan budaya tinggi, serta mampu memberikan kontribusi yang berarti di dalam percaturan budaya global.

Perkembangan masyarakat Indonesia di berbagai daerah akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan karena akan dapat membahayakan sendi-sendi persatuan bangsa dan kesatuan bernegara. Berbagai kerusuhan dan tindak kekerasan di berbagai daerah, apabila tidak segera diatasi, dalam waktu yang tidak terlalu lama, akan berakibat menjadi bangsa yang terpecah belah.

Untuk menghadapi situasi dan kondisi ini diperlukan kebijakan kebudayaan yang mengarah kepada tujuan pelestarian kebudayaan melalui pengenalan dan pemahaman tentang keanekaragaman budaya di Indonesia. Bersamaan dengan itu, diperlukan pula penanaman rasa memiliki dan menghargai kebudayaan sendiri.

Upaya pelestarian kebudayaan akan memerlukan kreativitas agar kebudayaan tetap hidup dan relevan dengan kehidupan bangsa di masa kini dan mampu menghadapi berbagai pengaruh asing yang negatif.

Adanya perubahan yang belum ditopang oleh nilai budaya bangsa yang kuat akan dapat menggoyahkan sikap mental bangsa. Oleh karena itu, diperlukan kemantapan budaya untuk menangkal nilai, norma, dan pandangan hidup yang dapat

mengganggu keseimbangan dan keutuhan jati diri bangsa Indonesia dan integritas nasional. Dengan demikian, tujuan pelestarian kebudayaan hendaknya diarahkan pada sasaran pengukuhan jati diri bangsa dan keutuhan nasional.

Kebudayaan mempunyai arti yang sangat penting untuk merekatkan kembali bangsa yang nyaris terpecah belah ini, karena kebudayaan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian perilaku yang dapat menjembatani perbedaan kebudayaan yang majemuk serta dapat membangun kesadaran kolektif sebagai suatu bangsa.

### **2.3. Perkembangan Pariwisata**

Perkembangan pariwisata Indonesia secara menyeluruh merupakan hasil kerja berbagai pihak pemerintah baik pusat maupun daerah, legislatif, pers, lembaga non pemerintah, swasta, BUMN, perguruan tinggi dan masyarakat.

Pada saat ini masih dirasakan bahwa sinergi dari upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengembangkan pariwisata nasional masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan antara lain, masih ada perbedaan persepsi yang perlu mendapatkan klarifikasi. Sektor pariwisata yang sejak akhir abad yang lalu menjadi salah satu andalan pemerintah dalam perolehan devisa, telah ditempatkan sebagai industri yang harus dipacu. Pendekatan “*boosterism*” sangat menonjol didalam pembangunan sektor tersebut.

Berbagai kemudahan yang telah diberikan untuk mendorong investasi di bidang kepariwisataan, tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Bahkan kemudahan-kemudahan tersebut yang semula ditujukan untuk mendorong pengembang yang serius dan profesional telah memicu tumbuhnya pengembang amatiran yang memanfaatkan kemudahan tadi untuk memperoleh keuntungan ekonomis jangka pendek tanpa memikirkan pencapaian tujuan kepariwisataan nasional yang berdampak positif dalam jangka panjang.

Perencanaan ditingkat nasional masih kurang dipahami oleh daerah dan banyak daerah yang menyusun rencana hanya karena didorong oleh alasan politis karena harus memiliki suatu rencana. Perencanaan pariwisata yang profesional dan menjadi kebutuhan publik dalam dasawarsa terakhir ini tidak diimbangi dengan tersedianya perencanaan yang berpengalaman yang memahami permasalahan kepariwisataan secara utuh.

Pada tahap pelaksanaan pembangunan, intervensi pemerintah pusat dimasa lalu sangat mewarnai perkembangan komponen utama sektor pariwisata yang berbentuk kawasan dan hotel. Berbagai kawasan wisata di luar Jawa dan Bali yang telah dirintis untuk memacu perkembangan belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan, karena upaya yang masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh mencakup semua aspek yang terkait. Koordinasi antara berbagai

departemen teknis dalam menunjang perkembangan kepariwisataan juga belum terwujud secara maksimal karena lebih terdorong oleh pendekatan sektoral yang selama ini mendominasi pendekatan perencanaan pembangunan nasional kita. Beberapa kawasan wisata yang muncul dalam bentuk “*enclave*” sebagai akibat dari pendekatan sektoral yang sangat dominan tidak selalu mampu memicu pertumbuhan sektor lain karena tidak berorientasi kepada pengembangan wilayah atau daerah secara utuh.

Penegakan hukum dalam pengendalian pembangunan dirasakan masih sangat lemah. Selain itu pariwisata lebih banyak tumbuh atas kekuatan pasar, terkonsentrasi ditempat-tempat yang sudah maju dan memudahkan proses penerimaan (*hosting*) maupun pemasaran. Kurang berkembang di tempat yang seharusnya dikembangkan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan kawasan barat-timur maupun dalam rangka mendistribusikan arus wisatawan guna mengurangi kepadatan di tempat-tempat tertentu yang dapat mengancam keseimbangan lingkungan fisik maupun sosial.

Berbagai indikator keberhasilan yang telah terukur saat antara lain ini adalah Jumlah kunjungan, perkiraan penerimaan devisa dan konstruksi fisik. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai puncaknya pada tahun 1997 dengan hampir 5,2 juta kunjungan, menurun drastis pada tahun 1998 dan baru mendekati pulih pada akhir tahun 2000 yang lalu. Jumlah perjalanan wisatawan Nusantara

belum tercatat secara akurat karena masih adanya berbagai hambatan a.l. SDM dan keterbatasan dana untuk menyediakan statistik kunjungan secara berkesinambungan. Merupakan suatu hal yang ironi bilamana wisatawan Nusantara yang diperkirakan jumlahnya melebihi 100 juta masih belum mendapat perhatian yang memadai. Padahal secara jangka panjang sasaran pengembangan pariwisata nasional ditujukan untuk meningkatkan jumlah wisatawan nusantara. Bahwasannya mempunyai dampak turunan terhadap peningkatan jumlah wisatawan mancanegara hal tersebut merupakan hikmah dari berkembangnya wisatawan nusantara. Dan memang dalam upaya pemulihan ekonomi ini, sasaran lebih ditujukan kepada wisatawan mancanegara dengan harapan dapat memperoleh tambahan devisa dalam jumlah yang cukup berarti.

Jumlah devisa yang diperoleh berdasarkan sampel dari "*passengers exit survey*" adalah sebesar US \$5 milyar pada tahun 2000. Pendapatan dari perjalanan ini pada tahun 2000 diperkirakan mencapai hampir Rp 16 trilyun.

Selain itu perlu pula dicermati kecenderungan pertumbuhan arus keluar wisatawan Indonesia yang selain menunjukkan kecenderungan meningkat juga membelanjakan devisa dalam jumlah yang cukup berarti. Walaupun demikian wisatawan yang ke luar negeri (*out bounds*) ini membelanjakan pula sebagian pengeluaran mereka di dalam negeri untuk menyiapkan perjalanan wisata mereka ke mancanegara.

Hal ini tidak dapat dicegah karena berwisata ke luar negeri merupakan bagian dari kebutuhan hidup kelompok masyarakat tertentu. Namun demikian kecenderungan tersebut dapat juga dilihat sebagai tantangan untuk lebih mengembangkan produk wisata nasional.

# BAB 3

## VISI DAN MISI

---

### 3.1. VISI

Visi Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata dirumuskan sebagai berikut :

**TERWUJUDNYA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA YANG MAJU, DINAMIS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN YANG MAMPU MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA SERTA MENINGKATKAN PERADABAN, PERSATUAN DAN PERSAHABATAN ANTAR BANGSA.**

Pernyataan tentang kebudayaan yang maju dan dinamis menegaskan bahwa kebudayaan itu akan terus berkembang dan senantiasa bergerak dinamis, baik secara linier, spiral, atau siklik.

Apabila dalam kenyataan terdapat kebudayaan yang terkesan kurang dinamis, hal itu terjadi karena kebudayaan itu sedang bergerak spiralik atau siklik melalui suatu proses evolusi mengitari para pelakunya.

Selain itu kebudayaan yang maju dan dinamis mengandung arti bahwa kebudayaan selalu tumbuh, berkembang mengikuti kebutuhan serta tuntutan

perkembangan jaman. Secara konseptual, kebudayaan merupakan perwujudan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri secara aktif terhadap lingkungan alam, sosial, dan buatan. Dan pada hakekatnya, kebudayaan merupakan suatu “pola bagi” dan “pola dari” tingkah laku yang nyata (*tangible*) maupun yang tidak nyata (*intangible*) yang diperoleh serta diwariskan melalui proses belajar dengan menggunakan lambang-lambang. Pengertian kebudayaan mencakup pula peralatan sebagai aspek kebendaan, sedangkan inti kebudayaan itu terdiri atas gagasan-gagasan dan nilai-nilai budaya yang merupakan hasil abstraksi pengalaman para pendukungnya yang selanjutnya menguasai sikap dan tingkah laku para pendukungnya.

Pengertian pariwisata yang maju dan dinamis menegaskan perkembangan pariwisata Indonesia yang memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berperan secara signifikan dalam pembangunan bangsa dan negara. Peran tersebut dapat diwujudkan baik dalam kerangka pembangunan perekonomian Indonesia melalui kontribusinya sebagai salah satu penghasil devisa utama, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, meningkatkan pembangunan wilayah serta meningkatkan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam maupun budaya melalui pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*).

Pariwisata yang maju dan dinamis mengandung pengertian bahwa tumbuh dan berkembangnya

Pariwisata Indonesia akan mampu menempatkan citra dan posisi Indonesia sebagai daerah tujuan wisata utama dalam peta kepariwisataan dunia, mampu membangun kualitas produk pariwisata Indonesia yang andal sehingga memiliki keunggulan saing (*competitive advantage*) dan keunggulan banding (*comparative advantage*) dalam peta kompetisi global maupun regional.

**Kebudayaan dan Pariwisata Yang Berwawasan Lingkungan** adalah pembangunan kebudayaan dan pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi kehormatan dan kesadaran terhadap nilai keseimbangan ekologis dan etnologis, prinsip pelestarian serta nilai manfaat jangka panjang dan berkelanjutan, sebagaimana yang tercermin dalam agenda pembangunan berkelanjutan, yang merupakan komitmen Indonesia, sebagai pelaksanaan dari Agenda 21 yang disepakati ditingkat global, maupun Etika Global Pembangunan Pariwisata (*Tourism Code of Ethics*)

Melalui konsep pembangunan yang bermuara pada perwujudan kebudayaan dan pariwisata yang maju, dinamis dan berwawasan lingkungan, maka pembangunan kebudayaan dan pariwisata nasional dalam suatu sistem yang sinergis akan mampu mewujudkan tujuan dan sasaran untuk mendorong upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan peradaban dan persatuan bangsa, serta persahabatan antar bangsa.

***Mencerdaskan kehidupan bangsa*** berarti mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi nilai agama, tradisi, adat istiadat, dan pandangan hidup masyarakat yang demokratis.

***Meningkatkan peradaban bangsa***, berarti perwujudan nilai-nilai peradaban bangsa melalui norma yang selanjutnya dijadikan tolok ukur bagi kepantasan perilaku warga masyarakat pendukungnya.

***Meningkatkan persatuan bangsa***, berarti perwujudan nilai keutuhan nasional, menghargai perbedaan (ke-bhineka-an) yang ada, demokrasi dan hak asasi manusia untuk berkebudayaan dan berpariwisata menuju masyarakat madani.

***Meningkatkan persahabatan antar bangsa***, berarti tampak makin nyata peran pembangunan kebudayaan dan pariwisata dalam ikut menciptakan perdamaian dunia, yang mencerminkan perwujudan penghargaan terhadap nilai hak asasi, persamaan kedudukan, pemahaman lintas budaya, penghargaan jati diri dan kedaulatan antar bangsa.

### **3.2. M I S I**

Untuk mewujudkan visi pembangunan kebudayaan dan pariwisata nasional, ditetapkan misi pembangunan kebudayaan dan pariwisata nasional, sebagai berikut :

1. Peningkatan pengembangan kebudayaan dan pariwisata di daerah dengan tetap mengacu kepada bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan sasaran terciptanya kebudayaan bangsa.
2. Peningkatan penelitian dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata nasional.
3. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata nasional.
4. Pembudayaan, sosialisasi dan penegakan hukum di bidang kebudayaan dan pariwisata.
5. Pembinaan dan pengembangan kebudayaan sebagai upaya memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa.
6. Perlindungan kebudayaan sebagai upaya melestarikan warisan budaya bangsa.
7. Pemanfaatan kebudayaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, persatuan dan kesatuan serta pergaulan dan peradaban antar bangsa.
8. Pengembangan produk pariwisata yang berwawasan lingkungan, bertumpu pada kebudayaan, peninggalan budaya dan pesona alam lokal yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global.
9. Mewujudkan industri budaya dan pariwisata sebagai salah satu andalan penghasil devisa.

10. Menjadikan Kebudayaan dan Pariwisata sebagai wahana pemberdayaan ekonomi rakyat, menciptakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, khususnya bagi industri skala kecil dan menengah.
11. Pengembangan kualitas dan kuantitas insan kebudayaan dan pariwisata yang profesional agar mampu berkiprah di arena internasional.
12. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur negara dalam penyelenggaraan, pembangunan kebudayaan dan pariwisata nasional.
13. Peningkatan upaya keberpihakan kepada pengusaha kecil dan menengah dibidang kebudayaan dan pariwisata.
14. Peningkatan peran dan kualitas sektor kebudayaan dan pariwisata dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan sehingga mengurangi kesenjangan antara kawasan Indonesia barat dengan kawasan timur.
15. Peningkatan pemanfaatan IPTEK dan Seni dalam mengembangkan industri kebudayaan dan pariwisata nasional.

# BAB 4

## ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

---

### 4.1. Situasi Nasional

Pembangunan kebudayaan dan pariwisata tidak dapat dilepaskan dari situasi, perubahan dan dinamika yang terjadi di tingkat nasional, regional maupun internasional yang satu sama lain saling berpengaruh dan terpengaruh. Kecenderungan yang terjadi di tingkat global, regional maupun nasional menunjukkan terjadinya kesenjangan dalam pembangunan dan tingkat kemajuan yang antara lain diindikasikan melalui munculnya istilah dunia Ketiga, untuk negara yang berkembang, seolah-olah terpisah dengan “dunia” nya negara maju; Utara-Selatan untuk menggambarkan konsentrasi negara maju di belahan Utara dan negara berkembang di belahan Selatan. Di tingkat regional Asia Pasifik kita juga dihadapkan pada adanya kesenjangan antara negara-negara yang dinamakan Macan-macan Asia atau negara industri baru (*new industrial countries*) yakni Taiwan, Korea Selatan, Hongkong dan Singapura dan negara-negara berkembang.

Kesenjangan semacam itu juga dijumpai di tingkat nasional dimana Kawasan Barat Indonesia mewakili propinsi yang relatif maju dan Kawasan Timur Indonesia yang relatif masih tertinggal.

Kesenjangan yang dimaksud meliputi hampir seluruh aspek pembangunan, tidak terkecuali di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Dalam rangka mengejar ketertinggalan kita dari negara industri maju di tingkat regional maupun global, pada masa lalu pemerintah memberikan tekanan dalam misi pembangunan nasional untuk melaksanakan industrialisasi secara cepat dan memadukan paradigma pembangunan kapitalis dan sosialis. Hal ini menyebabkan dominasi pembangunan lebih berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi dan kurang memperhatikan biaya sosial yang harus ditanggung oleh rakyat. Timbulnya aksi sosial untuk mempermasalahkan pelaksanaan pembangunan pada masa lalu merupakan akibat dari terabaikannya kepentingan masyarakat local dan masyarakat kecil. Dan lebih mementingkan serta mendukung kepentingan kaum pemodal besar.

Di samping itu adanya perubahan selera wisatawan yang berasal dari negara maju yang lebih mengutamakan obyek-obyek wisata berupa budaya, peninggalan sejarah dan budaya serta eko-wisata, diharapkan dapat menarik minat wisman untuk mengunjungi Indonesia yang dikenal banyak memiliki obyek-obyek peninggalan budaya atau sejarah, seni budaya yang sangat bervariasi dan eko-wisata termasuk antara lain terdapatnya satwa-satwa langka di berbagai daerah.

Pengakuan internasional terhadap sumber daya di bidang kebudayaan dan pariwisata Indonesia

sebagai bagian dari benda peninggalan dan “*world heritage*” menandakan bahwa Indonesia sesungguhnya memiliki daya tarik tingkat dunia yang memiliki nilai jual, dan mampu mendukung pengembangan budaya dan pariwisata demi kemajuan bangsa Indonesia.

Komitmen politik yang kuat dari pemerintah untuk mempersatukan bangsa dan menjadikan sektor pariwisata sebagai andalan dalam penerimaan devisa dapat merupakan modal utama bagi masyarakat pariwisata untuk menyiapkan rencana kegiatan sesuai dengan bidang usaha masing-masing. Selain itu penyatuan kebudayaan dan pariwisata kedalam satu departemen merupakan suatu indikasi dari visi Pemerintah tentang kebudayaan dan pariwisata macam apa yang diharapkan berkembang di Indonesia. Penyatuan tersebut merupakan keputusan yang strategis sebab pada hakekatnya kedua sub sektor mempunyai keterkaitan yang sangat erat.

Beberapa permasalahan dalam lingkungan strategis di tingkat nasional antara lain :

1. Gejala disintegrasi bangsa yang dihadapi sebagai akibat dari berbagai ketidakpuasan terhadap praktek politik dan pembangunan pada masa lalu.
2. Tuntutan demokrasi pada seluruh aspek kehidupan yang terkadang menimbulkan ekses karena kekurangan siapan masyarakat yang selama ini terkungkung.

3. Tuntutan untuk penyelenggaraan “*good governance*” sebagai prasyarat dasar untuk keluar dari berbagai krisis di segala bidang.
4. Semangat Otonomi Daerah yang menggebu-gebu dengan berlakunya UU No.22 dan No. 25 Tahun 1999, yang dapat menimbulkan berbagai implikasi positif maupun negatif. Semangat ini hendaknya dilandasi dengan kesadaran bahwa disamping hak juga terkandung kewajiban yang didesentralisasikan. Disamping itu juga harapan agar semangat otonomi tersebut tidak mendorong melebarnya kesenjangan antar daerah. Oleh karena itu semangat kebersamaan nasional perlu terus dipupuk.
5. Pola sentralistik yang selama ini diterapkan, telah memiskinkan keragaman budaya yang ditandai oleh terbatasnya ruang gerak pengelola kebudayaan, terpasungnya kreativitas seniman, tersisihnya peran pemangku adat dan tidak berfungsinya pranata lokal serta menurunnya rasa memiliki dan kebanggaan akan kebudayaan sendiri.
6. Industri budaya dan pariwisata berkembang, lebih didominasi oleh industri modern yang berasal dari luar, kurang mengakar kepada budaya dan nilai lokal. Masuknya berbagai perusahaan multi nasional atau usaha wara laba (*franchizing*) telah mewarnai wajah kota Indonesia yang mengesankan adanya dominasi budaya luar.

7. Krisis ekonomi yang berkepanjangan telah menyebabkan penurunan minat investasi di bidang kebudayaan dan pariwisata, dan juga menurunnya kinerja investasi yang telah ada, antara lain ditandai dengan banyaknya hotel yang tidak mampu membayar utang atau tidak mampu menutup biaya operasi karena terjadi penurunan tingkat hunian.
8. Pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya, khusus dalam kaitannya dengan pariwisata masih belum terwujud dengan optimal.
9. Kemajuan teknologi terutama teknologi informasi telah membawa berbagai macam budaya langsung ke masyarakat yang menyebabkan perubahan sikap dan perilaku masyarakat untuk cenderung lebih terpengaruh dibandingkan mempengaruhi budaya luar tersebut.
10. Lemahnya fundamental ekonomi untuk menghadapi persaingan global, sehingga lebih cenderung banyak menguras kekayaan sumber daya yang dimiliki termasuk sumber daya budaya dan pariwisata.

#### **4.2. Situasi Internasional**

Aspek-aspek yang diperkirakan dapat berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesinambungan pembangunan dan

pengembangan kebudayaan dan pariwisata Indonesia pada tataran makro, untuk skala internasional, dalam lima tahun ke depan antara lain, meliputi aspek politik, ideologi, pertahanan, keamanan, menghormati hak azasi manusia, peduli lingkungan (*environment*), globalisasi ekonomi dan perdagangan (*free trade*), serta kemajuan IPTEK.

Walaupun perkembangan global cenderung diwarnai oleh bergesernya berbagai benturan kepentingan antar bangsa namun dari kepentingan politik dan ideologi serta dan pertahanan keamanan, Perkembangan akhir-akhir ini memperlihatkan masih adanya kepentingan kekuatan adikuasa dalam setiap kebijakan antar bangsa. Kondisi ini merupakan faktor eksternal yang sewaktu-waktu dapat mengancam, walaupun pada sisi lain dapat dipandang sebagai faktor pendorong sekaligus tantangan bagi pembangunan serta pengembangan kebudayaan dan pariwisata nasional.

Menghormati Hak Azasi Manusia (HAM) dan kepedulian terhadap lingkungan hidup telah menjadi isu sentral secara global, dan telah menyatu dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Tingkat apresiasi dan jaminan suatu bangsa dan negara terhadap HAM dan lingkungan hidup secara langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi eksistensi persahabatan dan kerjasama negara tersebut dengan dunia internasional. Aspek HAM dan lingkungan hidup sebagai kekuatan eksternal yang sewaktu-waktu dapat mengancam kesinambungan, pembangunan,

diupayakan untuk dijadikan sebagai faktor pendorong dengan ditempatkan dalam skala prioritas di setiap proses pembangunan. Oleh karena itu, dalam pembangunan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata Indonesia, maka kepedulian dan jaminan terhadap HAM dan lingkungan hidup harus tetap diutamakan.

Abad 21 yang ditandai dengan makin majunya ilmu dan teknologi, telah menimbulkan perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat di bidang kebudayaan dan pariwisata. Kemajuan teknologi transportasi, telekomunikasi dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusia antar negara maupun pertukaran informasi secara maya (*virtual*). Kemajuan ini berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dunia secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupan, sehingga industri budaya dan pariwisata yang ingin bersaing di tingkat internasional perlu mengantisipasi dan mempersiapkan diri menyesuaikan perannya dengan perkembangan tersebut dan harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi secara optimal.

Sementara itu globalisasi yang telah membawa bangsa-bangsa di dunia ke dalam interaksi dan kerjasama yang lebih luas, pada akhirnya akan menghadapi bangsa-bangsa di dunia dalam kesepakatan atau ukuran standar kepatuhan yang harus disepakati bersama, termasuk didalamnya pemanfaatan kemajuan teknologi informasi, prosedur dan sistem keimigrasian serta berbagai sistem yang

sesungguhnya bertujuan untuk kenyamanan sesuai standar internasional. Makin global pemanfaatan kemajuan ilmu dan teknologi menjadi tuntutan yang makin harus dipenuhi agar Indonesia dapat tetap berada di tempat terhormat lingkungan pergaulan internasional.

Adanya fenomena ini secara bertahap akan menjadikan diterimanya konsep atau nilai-nilai universal dalam berbagai bidang yang mungkin dapat mengaburkan identitas dan kekhasan lokal. Namun demikian perlu disadari adanya paradoks global antara lain bahwa justru dalam era globalisasi, keunikan dan keaslian lokal makin diperlukan sebagai bagian dari jati diri dan daya tarik. Oleh karena itu, untuk mempertahankan daya saing dan keunggulan suatu bangsa dalam kancah pergaulan global, maka unsur lokal akan menjadi daya tarik dan elemen kunci yang sangat penting.

Kerjasama dan pergaulan yang makin global dan didekati dengan makin tinggi dan luasnya pemanfaatan kemajuan ilmu dan teknologi, harus diimbangi pula dengan penggantian dan upaya mengangkat unsur khas lokal yang semakin besar perannya dalam memberikan karakter dan identitas khusus suatu tempat yang justru akan meningkatkan keunggulan kompetitif.

Dalam beberapa dekade terakhir kecenderungan kunjungan antar negara ditandai dengan tumbuhnya kelompok baru dengan motivasi perjalanan khusus untuk terlibat secara aktif dan intensif dalam berbagai

aktifitas pertualangan alam, interaksi dengan masyarakat untuk mempelajari budaya dan berbagai keunikan lokal. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pengkayaan wawasan (*enriching*), pengembangan diri dan petualangan (*adventure*), serta untuk tujuan aktualisasi diri melalui keterlibatan dalam berbagai aktifitas yang unik dan menantang serta untuk meningkatkan saling pengertian antara berbagai kelompok/bangsa dengan budaya yang berbeda-beda.

Ditingkat regional Asia Pasifik, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki posisi strategis bagi negara lain. Pertama karena besarnya jumlah penduduk negara kepulauan ini merupakan sasaran pasar bagi negara maju. Kedua kekayaan yang terkandung didalamnya menyebabkan banyak negara lain menaruh perhatian dan berminat untuk ikut memanfaatkannya. Indonesia juga merupakan sumber tenaga kerja bagi di negara tetangga dekat seperti Singapura, Malaysia, Brunei, Hongkong dan lain-lain.

Dilain pihak Indonesia sendiri juga sangat tergantung dan terpengaruh oleh kemajuan dan perilaku pembangunan di negara lain. Singapura sebagai salah satu simpul transportasi internasional yang sangat padat telah menempatkan Indonesia sebagai "*hinterland*"nya. Kemampuan Singapura untuk mengundang lalu lintas orang dan barang dari seluruh dunia perlu dicermati dan dimanfaatkan dengan baik dan cerdas. Keterkaitan dan saling

pengaruh antar negara dan antar bangsa, kaum ataupun kelompok sosial ini pada hakekatnya telah ditunjukkan oleh sejarah perkembangan kebudayaan manusia di dunia. Proses saling “menukar” dan meminjam unsur kebudayaan antar kelompok tersebut telah terjadi melalui berbagai baik dengan cara damai maupun akibat berakhirnya suatu peperangan. Dan dilihat dari kaca mata positif, hal ini akan memperkaya budaya masing-masing.

Dinamika pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia yang diperkirakan akan bergeser ke kawasan Asia Pasifik telah ditandai dengan kemajuan pesat negara-negara seperti Singapura, Korea Selatan, Jepang, Cina (Hongkong dan Taiwan). Kondisi tersebut di atas akan menjadi faktor pembuka peluang bagi pembangunan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata Indonesia.

Perkembangan di lingkungan regional, khususnya Asean dan kawasan Asia Pasifik pada umumnya diwarnai oleh makin menguatnya kesadaran untuk memperkokoh kerjasama ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan dalam rangka terwujudnya stabilitas yang dinamis, yang dapat mendorong keberhasilan pembangunan nasional di negara masing-masing. Namun di lain pihak, akibat pertumbuhan pasar global dan kerjasama perdagangan regional, akan menumbuhkan praktek mekanisme pasar bebas (*free market*). Hal ini menuntut adanya kesiapan pelaku usaha, tidak terkecuali para pelaku di bidang kebudayaan dan pariwisata. Isyarat

tersebut makin kuat dengan akan diberlakukannya AFTA pada tahun 2003 sebagai bentuk kesepakatan bersama negara yang tergabung dalam Asean untuk menghilangkan beberapa hambatan dalam perdagangan yang meliputi : transaksi perdagangan barang dan jasa, sumber daya modal, investasi, dan mobilitas manusia.

Permasalahan yang timbul dalam menanggapi tantangan dan peluang yang terbuka dalam lingkungan strategis ditingkat regional dan global antara lain :

1. Bagaimana kebudayaan dan pariwisata dapat menjadi sarana diplomasi antar bangsa yang efektif dan saling menguntungkan.
2. Bagaimana budaya Indonesia dapat memberi andil pada budaya regional dan dunia, bukan sebaliknya selalu sebagai penerima pengaruh budaya asing yang makin mengabulkan budaya bangsa.
3. Bagaimana caranya Indonesia dapat memasuki pasar global melalui kebudayaan dan pariwisata, di mana masyarakat luas pun dapat berperan serta.
4. Bagaimana permasalahan lokal dapat diangkat dan diselesaikan bersama organisasi internasional misalnya pengembangan permuseuman dan penelitian arkeologis, sehingga dapat memberikannilai tambah yang berarti, dan kemungkinan pengembangan kesenian lokal

untuk dibina agar dapat berperan dipanggung budaya internasional.

5. Bagaimana mengantisipasi dan menyiasati perkembangan pariwisata yang cepat di kawasan Asia Pasifik agar Indonesia dapat meraih pangsa pasar yang berarti dan makin meningkat.
6. Bagaimana potensi kebudayaan dan pariwisata Indonesia dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan memberikan nilai tambah yang makin tinggi dalam menjawab tantangan dan peluang di tingkat regional dan global.
7. Pertumbuhan ekonomi yang menjadi dominan akibat pengaruh global maupun regional telah menyebabkan terjadinya transformasi masyarakat tradisional, dehumanisasi dan kerusakan lingkungan serta hubungan antara masyarakat dan wisatawan yang tidak setara, bukan hanya perbedaan budaya tetapi juga perbedaan status.
8. Kecenderungan perkembangan pariwisata di negara berkembang termasuk Indonesia yang tidak dapat menjadi obat mujarab untuk keluar dari krisis ekonomi. Pengalaman di negara lain menunjukkan bahwa pariwisata internasional menjadi salah satu bentuk baru imperialisme terselubung dan menciptakan ketergantungan. Oleh karenanya penyerapan unsur asing ke dalam budaya dan pariwisata Indonesia perlu diwaspadai secara cermat.

9. Negara berkembang termasuk Indonesia, belum/ tidak mampu untuk mengubah kecenderungan pasar global dan berada pada posisi tawar yang lemah dan sering kali terpaksa mengikuti keinginan pasar negara maju yang menguasai jaringan pasar internasional.



# **BAB 5**

## **TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

---

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan kebudayaan dan pariwisata didasarkan kepada tujuan dan sasaran pembangunan nasional jangka panjang dan dalam konteks lingkungan global. Tujuan Pembangunan Nasional Kebudayaan dan Pariwisata dirumuskan sebagai tujuan jangka panjang yang sifatnya lebih abadi dan dijadikan acuan menentukan arah kebijakan jangka pendek.

### **5.1. Tujuan Jangka Panjang**

Tujuan jangka panjang pembangunan budaya dan pariwisata nasional adalah terciptanya:

1. Bangsa yang mengenal, menghargai dan mencintai tanah air agar adat istiadat dan budaya Indonesia dengan kebhinnekaannya.
2. Kelestarian sistem sistem budaya Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur bangsa, budaya nasional dan diperkaya oleh budaya baru yang serasi dan kondusif untuk menghadapi tantangan masa depan

3. Kebudayaan bangsa Indonesia yang maju, beradab dan memperkuat persatuan bangsa; terbuka terhadap elemen baru kebudayaan luar yang dapat memperkaya dan memperkembangkan kebudayaan nasional serta mengangkat derajat dan harkat kemanusiaan bangsa Indonesia.
4. Kelestarian kebudayaan daerah yang beraneka ragam dalam bingkai kebudayaan nasional Indonesia sebagai kekayaan dan modal dalam pembangunan nasional.
5. Saling pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap budaya masyarakat lainnya.
6. Pariwisata Indonesia yang berkelanjutan yang mampu, mensejahterakan masyarakat kecil di daerah dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup dan budaya setempat.
7. Indonesia sebagai negara tujuan wisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dikunjungi dan memiliki daya saing bagi wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.
8. Pariwisata Indonesia yang memiliki keunggulan kompetitif di tingkat global yang didasarkan kepada kekayaan alam terestirial dan maritim, sebagai negara kepulauan yang beraneka ragam lingkungan sosial budayanya.
9. Peran nyata pariwisata dalam mengatasi kesenjangan perkembangan budaya barat-timur.
10. Pariwisata sebagai wahana pelestarian alam dan pengembangan budaya tradisional.

## **5.2. Tujuan Jangka Pendek**

Sebagai rincian tujuan jangka panjang tersebut, dirumuskan program jangka pendek pengembangan kebudayaan dan pariwisata nasional sampai dengan 2004 dengan fokus kepada terwujudnya :

1. Komitmen politik yang mendukung pembangunan kebudayaan dan pariwisata secara proposional sesuai dengan tugas yang dibebankan.
2. Partisipasi masyarakat dan swasta dalam membina dan mengembangkan kebudayaan dan pariwisata.
3. Pengelolaan dan pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata secara efisien dan efektif.
4. Desentralisasi di bidang kebudayaan dan pariwisata baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten dan Kotamadya.
5. Kebebasan seniman dan budayawan dalam menyalurkan daya ekspresi serta peran aktif masyarakat dalam mengembangkan kesenian daerah masing-masing untuk menuju terciptanya suatu kesenian/kebudayaan bangsa atau nasional yang bertaraf global.
6. Prakondisi bagi adanya sistem informasi kebudayaan dan pariwisata dengan memanfaatkan/ mengoptimalkan teknologi mutakhir.

7. Pemulihan citra pariwisata Indonesia yang baik di pasar internasional.
8. Penurunan jumlah konflik hubungan antar budaya, karena terbinanya saling pengertian atas perbedaan antarsuku bangsa dan agama, etnik.
9. Ekspansi pasar manca negara melalui tahapan rehabilitasi dan normalisasi dengan produk yang makin bermutu dan memiliki jati diri.

### **5.3. Sasaran Pembangunan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata**

Sasaran nasional pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata yang telah dituangkan didalam Propenas dikembangkan lebih lanjut menjadi sebagai berikut.

#### **Sasaran Bidang Kebudayaan**

1. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melestarikan kebudayaan daerah masing-masing dengan tetap dalam bingkai persatuan dalam wujud kebudayaan nasional, sesuai dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.
2. Peningkatan kebanggaan dan penghargaan terhadap keluhuran kebudayaan bangsa sendiri, sehingga dapat memperkuat kesadaran jati diri bangsa.
3. Peningkatan pelestarian nilai budaya bangsa melalui upaya pengungkapan, pengkajian dan penanaman nilai tradisi, adat istiadat, dan

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berkembang di masing-masing suku bangsa sehingga dapat menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, terutama pada generasi muda melalui jalur pendidikan dalam keluarga, masyarakat, pendidikan sekolah dan media masa.

4. Peningkatan upaya pengembangan industri film sebagai bagian dari kebudayaan, serta upaya meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap film produksi nasional.
5. Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bahasa Indonesia dan daerah serta pembinaan penggunaan bahasa Indonesia dan daerah secara baik dan benar.
6. Peningkatan apresiasi masyarakat terutama generasi muda terhadap hasil karya seni dan sastra Indonesia dan daerah.
7. Peningkatan upaya penulisan dan penanaman nilai sejarah dan kepahlawanan untuk menumbuhkan kebangsaan dan jiwa patriot terutama kepada generasi muda.
8. Peningkatan upaya perlindungan, pengamanan, pemeliharaan, perawatan (konservasi) dan pemugaran peninggalan sejarah dan purbakala yang tersebar di seluruh tanah air, termasuk arkeologi bawah air (*underwater archeology*).
9. Peningkatan upaya penyimpanan dan penyajian benda cagar budaya dalam museum untuk

menunjang keberhasilan program pariwisata dan pendidikan.

10. Peningkatan penelitian arkeologi (termasuk arkeologi bawah air) untuk mendapatkan data baru untuk penyusunan sejarah kehidupan bangsa.

Tercapainya sasaran Bidang Kebudayaan diharapkan akan mendukung tercapainya sasaran kepariwisataan.

### **Sasaran Bidang Pariwisata**

1. Kunjungan wisatawan mancanegara sampai dengan tahun 2004, diharapkan akan tumbuh sebesar 7%-10% /tahun dan wisatawan nusantara dengan pertumbuhan 1,9% per tahun.
2. Penerimaan devisa sebesar US \$ 7,6 milyar pada akhir tahun 2004 dan pengeluaran wisnus sebesar Rp 16,97 trilyun.
3. Peningkatan jumlah, kualitas dan variasi produk pariwisata dan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat dari usaha pariwisata di setiap daerah yang memprioritaskan pengembangan pariwisata
4. Peningkatan penyerapan tenaga kerja di bidang industri Kebudayaan dan Pariwisata dan pertumbuhan industri kecil dan menengah.
5. Peningkatan frekuensi kunjungan dan daerah tujuan kapal wisata (*cruise ship*) di wilayah Indonesia.

6. Peningkatan efektivitas kegiatan pariwisata sebagai wahana promosi seni dan budaya tradisional dan menumbuhkan saling pengertian antara kelompok masyarakat dan antar bangsa.
7. Peningkatan arus wisman dan wisnus di luar Jawa dan Bali.

Tecapainya sasaran bidang Pariwisata diharapkan akan mengubah kondisi kepariwisataan Indonesia yang dicerminkan dengan peningkatan angka kunjungan wisman, kenaikan perolehan devisa dari wisman, peningkatan jumlah wisnus serta terwujudnya berbagai lapangan kerja baru yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah-daerah.

#### **5.4. Tahapan Pencapaian Sasaran Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata**

Program umum pengembangan kebudayaan dan pengembangan kepariwisataan nasional, akan dilakukan secara bertahap. Pada dasarnya berbagai program tersebut merupakan arahan untuk diuraikan kedalam kegiatan tahunan. Cakupan program dapat berjangka panjang, melewati kurun waktu Renstra ini, dan sebagian meliputi sasaran pembangunan kebudayaan 2001-2004.

Di bidang kebudayaan sasaran yang tertuang di Bab ini, merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan tidak mudah untuk dikuantifikasikan. Peningkatan kesadaran masyarakat, kebanggaan dan

penghargaan terhadap keluhuran kebudayaan bangsa sendiri dan peningkatan pelestarian adalah suatu proses yang tidak berhenti dan sulit pengukurannya. Selain itu terdapat berbagai sasaran di bidang kebudayaan dan pariwisata yang masih perlu dirumuskan tolok ukur keberhasilannya. Kuantifikasi tidak selalu memberikan manfaat yang jelas, karena banyak hal hampir tak dapat diukur secara tepat. Kuantifikasi juga dapat mengundang interpretasi yang keliru oleh pihak yang kurang memahami latar belakang dan konteksnya.

Kinerja masa lalu juga tidak selalu merupakan tolok ukur yang baik untuk menilai keberhasilan masa kini atau masa yang akan datang karena dinamika perubahan situasi nasional, regional maupun global sangat cepat.

Kebudayaan dan pariwisata merupakan fenomena yang tidak mudah dirumuskan secara eksak, karena banyak dipengaruhi oleh berbagai variabel cerminan dari tingkah laku individu. Pengaruh eksternalitas yang rumit juga menyebabkan sulitnya melakukan prediksi. Dalam kaitannya dengan renstra, pengukuran kinerja akan merujuk kepada tujuan pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang tersirat dalam Propenas.

Secara ekonomi kinerja industri budaya dan pariwisata dapat diukur dari kemampuannya untuk menghasilkan devisa yang diproyeksikan dari jumlah kunjungan dan perkiraan rata-rata pengeluaran. Disamping itu kemampuan menyerap tenaga kerja

serta kemampuan menciptakan lapangan kerja baru merupakan pula ukuran peran pariwisata dalam perekonomian nasional. Selain itu tolok ukur ekonomik lainnya adalah peningkatan kontribusinya terhadap PDB yang akan mencakup tidak hanya pengeluaran wisatawan mancanegara, tetapi juga wisatawan nusantara. Gambaran kontribusi sektor pariwisata tercakup, antara lain di sektor perdagangan, hotel dan restoran, pada sebagian sektor industri, sektor transportasi, sektor pemerintahan dan lain-lain yang tidak terhimpun sebagai satu kesatuan, karena memang pariwisata termasuk kedalam kelompok "*multi components*"

Secara sosio-budaya pengukuran kinerja pembangunan kebudayaan dan pariwisata dikaitkan dengan sasaran nasional di dalam Propenas, antara lain dapat dilihat dari :

- Indikator berkurangnya konflik hubungan antarbudaya karena adanya saling pengertian dan pemahaman tentang hubungan antarbudaya yang berbeda.
- Berkembangnya berbagai wujud budaya nasional di dalam kehidupan masyarakat, yang tidak tertindas oleh wujud budaya luar yang dominan.
- Perkembangan pariwisata yang makin bertumpu pada peranserta masyarakat dengan melalui pemanfaatan budaya tradisional yang bertanggung jawab.
- Makin banyaknya unit usaha kecil dan menengah

di bidang kebudayaan dan pariwisata yang mampu memasuki pasar.

Program yang dirinci kedalam berbagai kegiatan dan dilaksanakan secara bertahap diharapkan dapat mewujudkan sasaran pembangunan kebudayaan dan pariwisata nasional yang dirumuskan tahapannya sebagai berikut.

Tahun	SASARAN
2001	<ul style="list-style-type: none"><li>• Berkurangnya konflik hubungan antarbudaya di Maluku dan Kalimantan</li><li>• Makin banyaknya wujud budaya daerah di kota</li><li>• Makin banyaknya pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang berbasis masyarakat berbentuk usaha kecil dan menengah</li><li>• 5,4 juta wisman, 128,52 juta wisnus</li><li>• Devisa US \$ 5,3 milyar, Pengeluaran wisnus Rp 15,7 triyun</li></ul>
2002	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konflik hubungan antarbudaya dapat diatasi terutama di luar Jawa.</li><li>• Wujud Budaya Daerah di kota makin nyata</li><li>• Makin banyak industri budaya dan pariwisata bertumpu pada masyarakat, berskala kecil dan menengah</li></ul>

- 5,8 juta wisman, 130,96 juta wisnus
  - Devisa US \$ 5,8 milyar pengeluaran wisnus Rp 16,37 triyun
- 2003
- Konflik hubungan antarbudaya secara bertahap sudah dapat diatasi.
  - Wujud Budaya daerah di kota makin banyak
  - Pertambahan industri budaya dan pariwisata rakyat
  - Makin kurangnya penyimpangan-penyimpangan dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata
  - 6,3 juta wisman, 133,45 juta wisnus
  - Devisa US \$ 6,3 milyar dan pengeluaran wisnus Rp 16,68 trilyun
- 2004
- Konflik hubungan antarbudaya sudah pulih kembali ke keadaan normal.
  - Wujud budaya daerah di kota makin kuat
  - Makin berkembangnya industri budaya dan pariwisata rakyat Makin terus berkurangnya penyimpangan dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata
  - 6,9 juta wisman, 135,75 juta wisnus
  - Devisa US \$ 7,5 milyar dan Rp 16,97 trilyun

Sasaran tersebut akan dapat diwujudkan bila pemerintah bersama-sama para pelaku dan ahli dibidang kebudayaan dan pariwisata sepakat untuk menjadikan acuan tersebut diatas sebagai sasaran di tingkat mikro melalui kegiatan-kegiatan nyata yang terukur.

# **BAB 6**

## **KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

---

Yang dimaksud dengan kebijakan nasional adalah pengambilan keputusan pada tingkat nasional yang merupakan penetapan tujuan dari tindakan bersama di bidang kebudayaan dan pariwisata. Pengambilan keputusan tingkat nasional ini berkaitan dengan upaya untuk mendorong para pelaku di sektor kebudayaan dan pariwisata dalam mencapai sasaran yang digariskan dan tujuan yang ditetapkan.

### **6.1. Kebijakan**

1. Menjunjung tinggi keberagaman serta kebhinnekaan budaya nusantara dalam negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Keterbukaan secara kritis selektif terhadap masuknya budaya asing bagi peng-kaya-an budaya Indonesia.
3. Perlindungan hukum terhadap segala bentuk peninggalan budaya perlu ditegakkan.
4. Kebudayaan dan pariwisata hendaknya dilihat sebagai dua sisi dari satu mata uang yang satu sama lain saling mendukung dan mendorong pengembangan (bukan yang satu menjadi bagian dari yang lain).

5. Kebudayaan dan pariwisata adalah wahana (*means*) untuk pengembangan wilayah, bukan tujuan akhir. Sementara kebudayaan harus berkembang di seluruh nusantara, pengembangan pariwisata perlu mempertimbangkan potensi secara realistik.
6. Dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata, masyarakat merupakan subyek pembangunan dan bukan hanya sebagai obyek pembangunan.
7. Pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata menjadi tanggung jawab seluruh bangsa dan negara kesatuan Indonesia. Peninggalan sejarah dan purbakala, di mana saja di nusantara ini adalah milik bangsa Indonesia yang penyelamatannya menjadi tanggung jawab bersama.
8. Pemanfaatan unsur kesenian dan kebudayaan serta unsur alami untuk pariwisata harus dilakukan secara bertanggung jawab dan menuju kepada pelestarian alam dan pengkayaan budaya agar dapat menjadi wahana persahabatan antar bangsa, dan menunjang pelestarian lingkungan alam.
9. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata dilakukan melalui pendekatan kesisteman yang utuh dan terpadu dengan kriteria multidimensi.
10. Pembangunan/ pengembangan kebudayaan dan pariwisata dilakukan dengan berazaskan efektivitas biaya yang dikeluarkan.

11. Menjadikan Indonesia sebagai tujuan wisata dalam bentuk multidestinasi untuk berbagai segmen pasar, internasional maupun domestik

## **6.2. Strategi**

Dalam menunjang kebijakan nasional tersebut, strategi pengembangan kebudayaan dan pariwisata tidak ditujukan kepada penyeragaman dengan dalih nasionalisasi, tetapi kesatuan dan persatuan bangsa harus dibangun dalam kebhinnekaan, sehingga justeru karakter lokal harus mengemuka tanpa meninggalkan bingkai kenasionalannya.

Daerah satu dengan lain tidak hanya beragam alam dan budayanya namun juga beragam tingkat perkembangannya secara umum dan luas, tak terkecuali dibidang kebudayaan dan pariwisata. Pada dasarnya daerah yang sudah berkembang perlu dikonsolidasikan, yang belum berkembang perlu dipacu dan yang sedang mulai berkembang didorong untuk terus maju secara terarah dan terencana.

- 1. Mengembangkan muatan lokal tentang kebudayaan dan pariwisata untuk seluruh jenjang pendidikan umum maupun khusus,** dalam rangka meningkatkan jati diri dan apresiasi terhadap tanah air, bangsa dan budaya dalam mengakomodasi secara kritis selektif masuknya unsur budaya asing bersamaan dengan arus globalisasi dan internasionalisasi.

2. **Perubahan paradigma pembangunan industri budaya pariwisata dari industri yang berbasis sumber daya menjadi industri yang berbasis pengetahuan**, dalam rangka meningkatkan nilai tambah terhadap sumber daya yang dimiliki.
3. **Memposisikan pengembangan SDM sebagai prioritas utama untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan kebudayaan dan pariwisata**, dalam rangka pencerdasan bangsa dan secara kritis selektif meningkatkan keunggulan modal budaya dan pariwisata Indonesia
4. **Pengembangan kebudayaan dan pariwisata di daerah yang relatif belum berkembang untuk mengundang investasi sektor-sektor lain**, dalam rangka mendukung upaya penyeimbangan kesenjangan antardaerah pengembangan kebudayaan dan pariwisata tidak ditujukan kepada penyeragaman dengan dalih nasionalisasi, tetapi kesatuan dan persatuan bangsa harus dibangun dalam kebhinnekaan, sehingga justeru karakter lokal harus mengemuka tanpa meninggalkan bingkai ke nasionalannya. Daerah satu dengan yang lain tidak hanya beragam atau dan budayanya namun juga beragam tingkat perkembangannya secara umum dan luas, tidak terkecuali di bidang kebudayaan dan pariwisata. Pada dasarnya daerah yang sudah berkembang perlu dikonsolidasikan, yang belum berkembang perlu

dipacu dan yang sedang mulai berkembang di dorong untuk terus maju secara terarah dan terencana.

5. **Pengembangan produk kebudayaan dan pariwisata yang beragam, sesuai dengan identitas daerah** atau wilayah untuk meningkatkan pangsa pasar global dan redistribusi pasar domestik.
6. **Secara ketataruangan nasional, pengembangan pariwisata dilakukan dengan pendekatan kewilayahan**, dalam arti bahwa Indonesia memiliki Kebhinekaan sumber daya alam dan budaya sehingga tiap wilayah memiliki keunggulan dan kekhasan produk yang spesifik untuk segmen pasar tertentu. Pendekatan kewilayahan ini tidak identik dengan pendekatan administratif. Satuan budaya dan sumber daya wisata hendaknya tidak dikekang oleh batas administratif pemerintahan.
7. **Komplementaritas antarwilayah** Kebhinekaan antarwilayah merupakan potensi yang perlu dikemukakan untuk menciptakan rangkaian produk nasional yang beragam saling memperkuat.

Pendekatan kewilayahan ini juga dimaksudkan untuk mengurangi persaingan yang antar wilayah yang bersifat negatif, karena secara nasional Indonesia harus menghadapi persaingan global. Perbedaan antar dan di dalam wilayah dalam tingkat perkembangan di dekati dengan pilihan intensifikasi, ekstensifikasi atau

konsolidasi dalam pengembangannya dengan tetap didasari semangat kerjasama (*cooperation*).

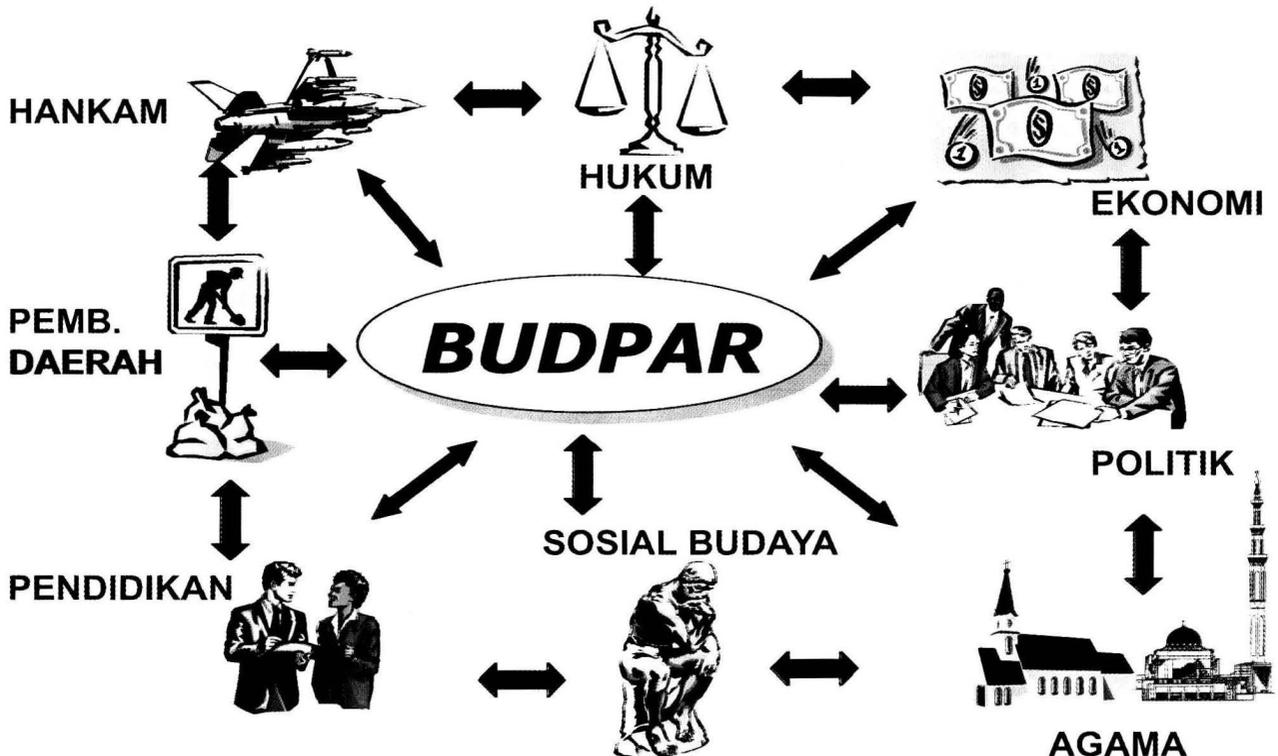
8. Dalam kaitannya dengan pendekatan kewilayahan, dan untuk meraih pasar internasional, perlu dikembangkan **gerbang primer sebagai pintu masuk ke wilayah** yang bersangkutan.

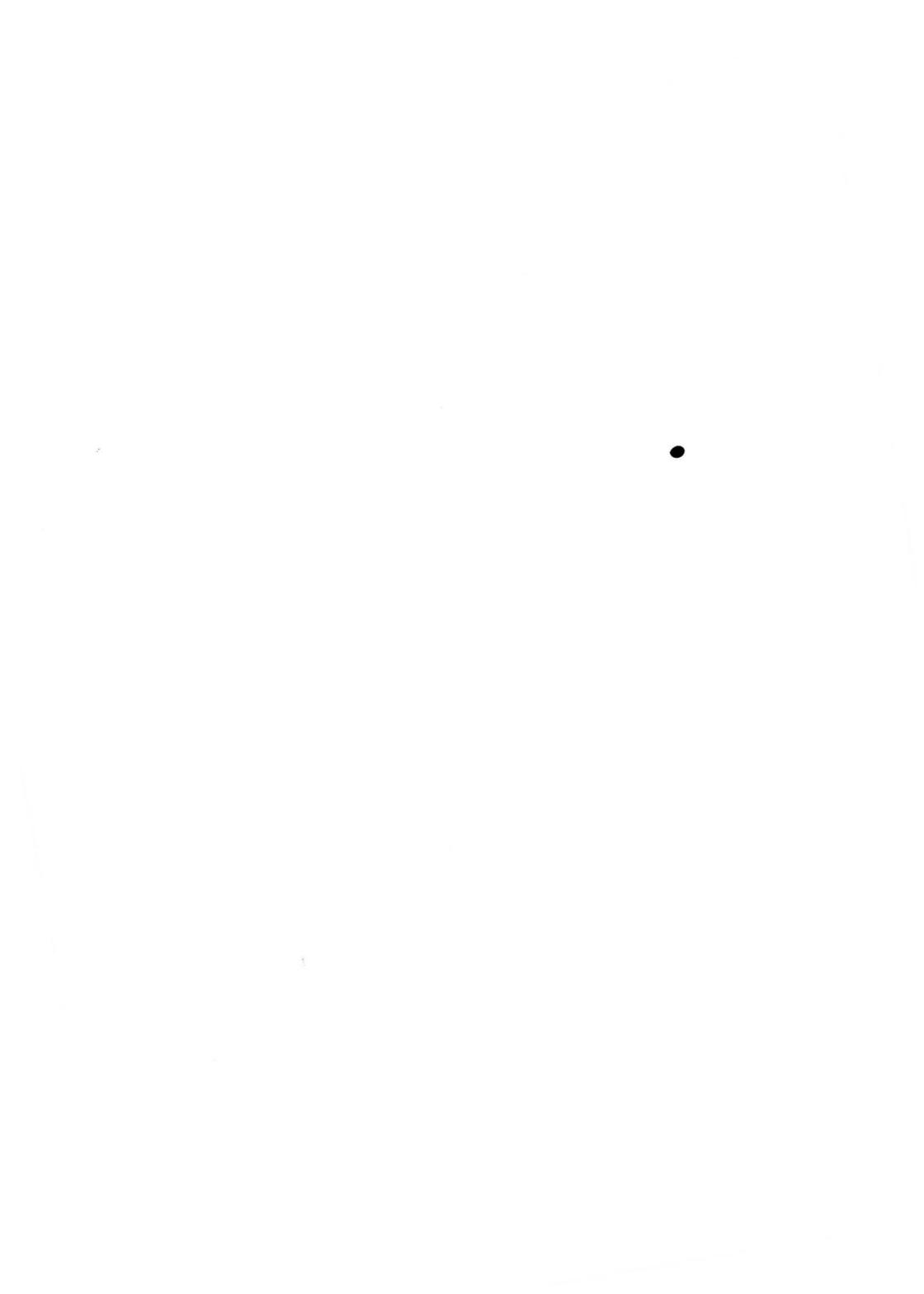
Gerbang primer atau populer sebagai pintu gerbang internasional ini tidak berdiri sendiri namun merupakan bagian yang integral dengan pengembangan komponen lainnya.

9. **Fokus pembangunan kebudayaan dan pariwisata kepada industri kecil dan menengah**, dalam rangka menggalakkan ekonomi kerakyatan sebagai landasan yang kokoh bagi perekonomian nasional.

10. **Pelebagaan budaya ramah lingkungan dan kemitraan**, dalam rangka pemeliharaan lingkungan alam dan budaya sebagai aset bangsa dan sumber daya wisata dan meningkatkan peranan masyarakat.

# **PENDEKATAN KOMPREHENSIF INTEGRAL PEMBANGUNAN BUDPAR**





# BAB 7

## PROGRAM KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SERTA PROGRAM PENDUKUNG LINTAS SEKTOR

---

Sebagaimana telah digariskan dalam Propenas bahwa pada skala nasional terdapat 2 (dua) program yang terkait dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata, yaitu:

**Pertama**, Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya leluhur, keragaman budaya dan tradisi, meningkatkan kualitas berbudaya masyarakat, menumbuhkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya dan memperkuat ketahanan budaya.

**Kedua**, Program Pengembangan Pariwisata yang bertujuan untuk mengembangkan dan memperluas diversifikasi produk dan kualitas pariwisata nasional yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat dan kebudayaan dan sumber daya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian budaya dan tradisi serta kelestarian lingkungan hidup setempat, mengembangkan dan memperluas pasar pariwisata terutama pasar luar negeri.

Sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu bahwa keberhasilan pembangunan kebudayaan dan pariwisata tidak dapat diwujudkan hanya oleh Depbudpar karena ada berbagai departemen teknis serta pihak lain; swasta maupun masyarakat dan berbagai lembaga yang terlibat dalam kebudayaan dan pariwisata yang diharapkan dapat bersama-sama memainkan peran masing-masing. Keterlibatan berbagai pihak tersebut tidak seluruhnya dapat dinyatakan didalam Renstra ini karena luasnya cakupan maupun karena cepatnya dinamika sektor kebudayaan dan pariwisata.

Pada hakekatnya program kegiatan di Depbudpar merupakan bagian integral dari program skala nasional yang secara menyeluruh dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional bidang kebudayaan dan pariwisata, namun demikian dalam rangka strukturisasi program dilakukan pengklasifikasian maupun penjenjangan sehingga terlihat secara jelas dimana muaranya. Secara hierarkhis, substansi dibedakan menjadi program, subprogram, dan pokok-pokok kegiatan.

Namun demikian, perlu disadari bersama bahwa interpretasi terhadap materi program dalam bab ini hendaknya tetap pada rambu-rambu fungsi pemerintah pusat selaku pembina, perumus kebijakan, pencetus dan pengembang norma, standar, dan pedoman-pedoman yang terkait dengan nomenklatur atau nama program yang bersangkutan.

## **A. Program Umum Bidang Kebudayaan dan Pariwisata**

### 1. Subprogram Pengembangan Sistem Pengawasan dan Tata Laksana.

Pokok-pokok kegiatan, antara lain:

- 1.1. Pengembangan Perencanaan Program Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata
- 1.2. Pengembangan Organisasi
- 1.3. Pengembangan Produk Hukum
- 1.4. Pengembangan Sistem Pengawasan Dep-BudPar
- 1.5. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

### 2. Subprogram Pengembangan SDM

Pokok-pokok kegiatan, antara lain:

- 2.1. Pengembangan Sistem Kediklatan Budaya dan Pariwisata
- 2.2. Pengembangan dan Pemantapan Program Pendidikan
- 2.3. Pengembangan dan Perencanaan Ketenaga-kerjaan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- 2.4. Pengembangan Materi Pendidikan Budaya dan Pariwisata

### 3. Subprogram Pengembangan Sistem Informasi

Pokok-pokok kegiatan, antara lain:

- 3.1. Pengembangan Basis Data (BudPar)
- 3.2. Pengembangan Perangkat Keras
- 3.3. Pengembangan Sistem Jaringan (distribusi)

### 4. Subprogram Internasional

Pokok-pokok kegiatan, antara lain:

- 4.1. Perwujudan "*House of Indonesia*"
- 4.2. Penyelenggaraan Peristiwa Internasional
- 4.3. Penyelenggaraan Kerjasama Internasional
- 4.4. Peningkatan Peran dalam Organisasi Inter-nasional
- 4.5. Penyusunan Pedoman Kerjasama Internasional

### 5. Subprogram Penelitian Terapan

Pokok-pokok kegiatan, antara lain:

- 5.1. Penelitian Sejarah Dan Seni
- 5.2. Penelitian Pasar Pariwisata Indonesia (Mancanegara dan Domestik)
- 5.3. Penelitian Dampak Pariwisata
- 5.4. Penelitian Peranan Budaya Bagi Pariwisata
- 5.5. Penelitian Kinerja sektor Kebudayaan dan Pariwisata

## 6. Subprogram Pengembangan Kepustakaan

Pokok-pokok kegiatan, antara lain:

- 6.1. Dokumentasi Sejarah, Cagar Budaya, dan Sumberdaya Wisata lainnya
- 6.2. Publikasi bidang Budaya dan Pariwisata
- 6.3. Pengembangan Perpustakaan Kebudayaan dan Pariwisata

## 7. Subprogram Pemajuan Masyarakat

Pokok-pokok kegiatan, antara lain:

- 7.1. Pengembangan Apresiasi dan Penanaman Nilai-nilai Budaya
- 7.2. Pengembangan Jatidiri Bangsa yang Bertumpu pada Budaya Indonesia
- 7.3. Pengembangan Kebudayaan bagi Promosi dan sebagai bagian dari Produk Pariwisata
- 7.4. Pengembangan Berkreasi dan Bersikap Kritis
- 7.5. Pemberdayaan Masyarakat di lokasi Strategis Potensial
- 7.6. Pendidikan Publik untuk Menjadi Wisatawan dan Tuan Rumah yang Baik

## 8. Subprogram Peningkatan Keterpaduan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata

Pokok-pokok kegiatan, antara lain:

- 8.1. Pembentukan Jaringan Kerja (Networking) antarpara pelaku pembangunan

8.2. Pengembangan Sistem dan Mekanisme untuk Mendukung Keterpaduan Pembangunan

8.3. Sosialisasi dan Koordinasi (promosi program kebudayaan dan pariwisata ke sektor/pihak lain)

## **B. Program Pemajuan Kebudayaan**

1. Subprogram Pemajuan Nilai Budaya, Seni & Film

Pokok-pokok kegiatan, antara lain:

- 1.1. Pembinaan Nilai Budaya, Seni dan Film
- 1.2. Pengembangan Perfilman dengan Muatan Budaya yang Beragam

2. Subprogram Pemajuan Sejarah, Permuseuman dan Kepurbakalaan

Pokok-pokok kegiatan, antara lain:

- 2.1. Perlindungan Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan
- 2.2. Perlindungan dan Pengembangan Permuseuman Nasional dan Daerah
- 2.3. Pemanfaatan Kesenjajahan, Permuseuman, dan Kepurbakalaan bagi Pendidikan Bangsa dan Pariwisata

3. Subprogram Pemajuan Sejarah, Permuseuman dan Kepurbakalaan

Pokok-pokok kegiatan, antara lain:

- 3.1. Perlindungan Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan
- 3.2. Perlindungan dan Pengembangan Permuseuman Nasional dan Daerah
- 3.3. Pemanfaatan Kesejarahan, Permuseuman dan Kepurbakalaan bagi Pendidikan Bangsa dan Pariwisata

4. Subprogram Pemajuan Tradisi dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Pokok-pokok kegiatan, antara lain:

- 4.1. Pelestarian dan Pengembangan Tradisi dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- 4.2. Apresiasi terhadap Keragaman Tradisi dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

## **C. Program Pengembangan Kepariwisata**

1. Subprogram Pengembangan Produk

Pokok-pokok kegiatan, antara lain:

- 1.1. Diversifikasi Produk
- 1.2. Standarisasi Mutu Produk
- 1.3. Strukturisasi Industri Pariwisata
- 1.4. Pengaturan Arus Wisatawan dan Penentuan lokasi Prioritas

- 1.5. Pembinaan di Indonesia Timur
2. Subprogram Pengembangan Promosi

Pokok-pokok kegiatan, antara lain:

- 2.1. Pengembangan Promosi Domestik
- 2.2. Pengembangan Promosi Internasional
- 2.3. Pengembangan Promosi Kelompok Khusus (pemuda, lansia)
- 2.4. Fasilitas Promosi Bagi Pengusaha Kecil dan Menengah

#### **D. Program Pendukung Lintas Sektor**

Program ini merupakan program yang diharapkan dilakukan oleh berbagai instansi/lembaga lain yang akan ikut menentukan keberhasilan pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.

Pokok-pokok kegiatan, antara lain:

1. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata nusantara bersama Diknas, Pemda, Ormas/Ornop)
2. Penelitian dan Pengembangan Pengetahuan lintas disiplin yang terkait dengan Kebudayaan dan Pariwisata (LIPI, PTN/S)
3. Pemberdayaan masyarakat (bersama dengan Depdagri & Pemda)
4. Pemantapan dan peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Dephan, POLRI).
5. Pengendalian tenaga kerja asing kebudayaan dan

- pariwisata (Depnaker).
6. Peningkatan mutu produk dan pelayanan pariwisata (Dep. Kehakiman dan HAM, Depdagri, Depkes dan Kessos, Depkeu)
  7. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan (Dephubtel, Depkimpraswil)
  8. Pembinaan Otonomi di bidang kepariwisataan (Depdagri)
  9. Pemantapan pendidikan pariwisata bersama (Depdiknas, Kopertis)
  10. Pengendalian struktur industri pariwisata (BKPM, Dep. Keuangan)
  11. Pemanfaatan TN (Taman Nasional), THR (Taman Hutan Raya), TNL (Taman Nasional Laut) dalam rangka pengembangan wisata-eko. (Dep. Kehutanan)
  12. Penyesuaian tarif (airport tax, tiket masuk ke Taman Nasional, biaya tambat /masuk kapal pesiar, fiskal ke luar dan lain-lain (Dephubtel dan Dephut).
  13. Pengembangan sistem dan jaringan informasi kebudayaan dan pariwisata (MPI, Deplu, dll)
  14. Pengembangan Statistik Kebudayaan dan Pariwisata (BPS, Asosiasi Industri, Pemda, dll)

Dengan mengidentifikasikan berbagai kegiatan lintas sektoral, diharapkan pihak-pihak terkait dapat membantu dan mendukung sasaran pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata, baik ditingkat nasional maupun di tingkat daerah.



# **BAB 8**

## **PENUTUP**

---

Rencana Strategis (Renstra) sektor Kebudayaan dan Pariwisata 2000-2004 dalam pelaksanaan pada lingkup Depbudpar akan dirinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) Kebudayaan dan Pariwisata yang memuat rencana anggaran biaya dengan kinerja yang terukur sebagai dasar penyusunan DUP/DUK.

Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi unit kerja atau satuan kerja (satker) di lingkungan Depbudpar khususnya pada saat penyusunan program kerja dan anggaran tahunan.

Dan demi terwujudnya perencanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang lebih terpadu, menyeluruh, dan terkendali pelaksanaannya, unit kerja atau satker bidang perencanaan di lingkungan Depbudpar seharusnya melakukan pula koordinasi perencanaan pembangunan, anggaran serta bersama unsur Inspektorat Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja melalui mekanisme yang tepat dan terarah.

Hasil perencanaan pembangunan dan anggaran yang diperoleh dari proses ini akan menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam pembahasan dan penetapan Repeta yang tertuang dalam APBN bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap tahun.

Dengan demikian siklus penyusunan rencana pembangunan sektor kebudayaan dan pariwisata nasional dapat dijadikan acuan bagi instansi ataupun pelaku kebudayaan dan pariwisata didalam menyusun program kerja masing-masing di berbagai tingkatan.

Selain itu sesuai dengan sifat dari Renstra maka pemutakhiran dari substansi yang terkandung dalam Renstra ini akan selalu disesuaikan agar dapat tetap mengikuti dinamika perubahan sektor kebudayaan dan pariwisata nasional maupun global, sehingga dengan demikian Renstra ini akan merupakan “*rolling-plan*”.

Semoga Renstra ini bermanfaat dan dapat dijadikan acuan para pembacanya.

Jakarta, 1 Juni 2001

**DAFTAR NAMA PEJABAT DI LINGKUNGAN  
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

NO	N A M A	J A B A T A N	TELP / FAKS / EMAIL
	<b>I Gede Ardika</b>  <i>Staf Ahli Menteri</i>	<b>Menteri</b>	<b>Tlp. 3838805 Faks. 3848245 ardika@depbudpar.go.id</b>
1	Udin Saifuddin	SAM Bidang Hubungan Antar Lembaga	Tlp. 3838526 Faks. 3848245 udin@depbudpar.go.id
2	Edward Situmorang	SAM Bidang Ekonomi	Tlp. 3838350 Faks. 3848245 edward@depbudpar.go.id
3	Nunus Supardi	SAM Bidang Peran Serta Masyarakat	Tlp. 3838550 Faks. 3848245 nunus@depbudpar.go.id
4	Anhar Gonggong	SAM Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Budaya	Tlp. 3838450 Faks. 3848245 anhar@depbudpar.go.id
5	Myra Puspasari Gunawan	SAM Bidang Sumber Daya dan Lingkungan	Tlp. 3838250 Faks. 3848245 myra@depbudpar.go.id
	<b>Sekretariat Jenderal</b>		
1	Setyanto P. Santosa	Sekretaris Jenderal	Tlp. 3838806 Faks. 3867600 setyanto@depbudpar.go.id
2	Sambudjo Parikesit	Kepala Biro Perencanaan	Tlp. 3838686 Faks. 3868013 sambudjo@depbudpar.go.id
3	Suryanto	Kepala Biro Kepegawaian	Tlp. 3838644 Faks. 3840312 suryanto@depbudpar.go.id
4	Mudijono	Kepala Biro Keuangan	Tlp. 3838648 Faks. 3838643 mudijono@depbudpar.go.id

NO	N A M A	J A B A T A N	TELP / FAKS / EMAIL
5	Rusli Yahya	Kepala Biro Hkm. Org. & Humas	Tlp. 3838514 rusli@depbudpar.go.id
6	Sjamsul Bahri	Kepala Biro Umum	Tlp. 3838158 Faks. 3840210 sjamsul@depbudpar.go.id
7	Wardiyatmo	Kapusdatin	Tlp. 3838717 Faks. 3452006 wardiyatmo@depbudpar.go.id
<b>Inspektorat Jenderal</b>			
1	Budiharto	Inspektur Jenderal	Tlp. 3838807 Faks. 3440079 budiharto@depbudpar.go.id
2	Erwin Mansoer	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Tlp. 3838583 Faks. 3440079 erwin@depbudpar.go.id
3	H. Azhari Abdullah	Inspektur II	Tlp. 3838503 Faks. 3440079 azhari@depbudpar.go.id
4	Iskandar Zulkifli	Inspektur III	Tlp. 3838616 Faks. 3440079 iskandar@depbudpar.go.id
<b>Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film</b>			
1	Sri Hastanto	Direktur Jenderal	Tlp. 3860823 Faks. 3860823 hastanto@depbudpar.go.id
2	Abdurrahman	Sekretaris Direktorat Jenderal	Tlp. 3842525 abdurahman@depbudpar.go.id
3	Surya Yuga	Kepala Direktorat Kesenian	Tlp. 5725046 surya@depbudpar.go.id
4	Winarno Sudjas	Kepala Direktorat Fasilitas dan Pengembangan Perfilman & Rekaman Video	Tlp. 3838444 winarno@depbudpar.go.id

NO	N A M A	J A B A T A N	TELP / FAKS / EMAIL
1	<b>Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala</b> I G N Anom	Direktur Jenderal	Tlp. 3840185 Faks. 3840185 anom@depbudpar.go.id
2	Junus Satrio Atmojo	Sekretaris Direktorat Jenderal	Tlp. 3840260 Faks. 3838261 satrio@depbudpar.go.id
3	Susanto Juhdi	Kepala Direktorat Sejarah	Tlp. 5725044 Faks. 572618 susanto@depbudpar.go.id
4	Hari Untoro Drajat	Kepala Direktorat Purbakala	Tlp. 5725048 Faks. 5725512 hari@depbudpar.go.id
5	Luthfi Asiarto	Kepala Direktorat Permuseuman	Tlp. 5725047 Faks. 5725623 uthffi@depbudpar.go.id
1	<b>Direktorat Jenderal Pengembangan Produk Pariwisata</b> Robertus Sarwono	Direktur Jenderal	Tlp. 3838471 Faks. 3868522 sarwono@depbudpar.go.id
2	Suharto	Sekretaris Direktorat Jenderal	Tlp. 3838236 Faks. 3868522 suharto@depbudpar.go.id
3	Sudiono	Kadit. Bina Obyek & Daya Tarik Wisata	Tlp. 3838402 sudiono@depbudpar.go.id
4	Titien M Soekarya	Kadit. Bina Usaha Jasa Pariwisata	Tlp. 3838242 titien@depbudpar.go.id
5	Luther Barrung	Kadit. Bina Usaha Sarana Pariwisata	Tlp. 3838395 luther@depbudpar.go.id
6	Wibowo	Kadit. Bina Baku Mutu Produk Pariwisata	Tlp. 3838207 wibowo@depbudpar.go.id

NO	N A M A	J A B A T A N	TELP / FAKS / EMAIL
7	Abdul Kadir Wiyatman	Kadit. Bina Masyarakat & Pariwisata Nusantara	Tlp. 3838275 kadir@depbudpar.go.id
	<b>Direktorat Jenderal Pemasaran dan Kerjasama Luar Negeri</b>		
1	Thamrin Bhiwana Bachri	Direktur Jenderal	Tlp. 3838180 bhiwana@depbudpar.go.id
2	Ries Hartadi	Sekretaris Direktorat Jenderal	Tlp. 3838423 hartadi@depbudpar.go.id
3	Pardomuan Siregar	Kepala Direktorat Promosi	Tlp. 3838498 pardomoan@depbudpar.go.id
4	Tjetjep Suparman	Kadit. Informasi Pemasaran	Tlp. 3838146 cecep@depbudpar.go.id
5	Suwati Kartiwa	Kadit. Kerjasama Bilateral & Regional	Tlp. 3838448 kartiwa@depbudpar.go.id
6	F. Gromang	Kadit Kerjasama Multilateral	Tlp. 3838431 gromang@depbudpar.go.id
	<b>Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Latihan</b>		
1	A. Widyastuti Parwoto	Kepala Badan	Tlp. 3838279
2	Barisno	Sekretaris Badan	Tlp. 3838726 barisno@depbudpar.go.id
3	A.R. Muslich M.	Kapus Penelitian & Pengembangan	Tlp. 3838538 muslih@depbudpar.gi.id
4	Sumekto Djajanegara	Kapus Pendidikan & Pengembangan	Tlp. 3838725 sumekto@depbudpar.go.id

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>J A B A T A N</b>	<b>TELP / FAKS / EMAIL</b>
5	Haris Sukendar	Kapus Penelitian Arkeologi	Tlp. 7988131 haris@depbudpar.go.id
6	I Wayan Bendhi	Ketua STP Bandung	Tlp. (022) 2011456
7	Putu Laksaguna	Ketua STP Bali	Tlp. (0361) 773538
8	Amir Tanuamijaya	Direktur AKPAR Medan	Tlp. (061) 6629441
9	Agus Mangatta	Direktur AKPAR Makasar	Tlp. (0411) 855624

*Jakarta, Juni 2001*

**Perpustakaan  
Jenderal K**

348  
K